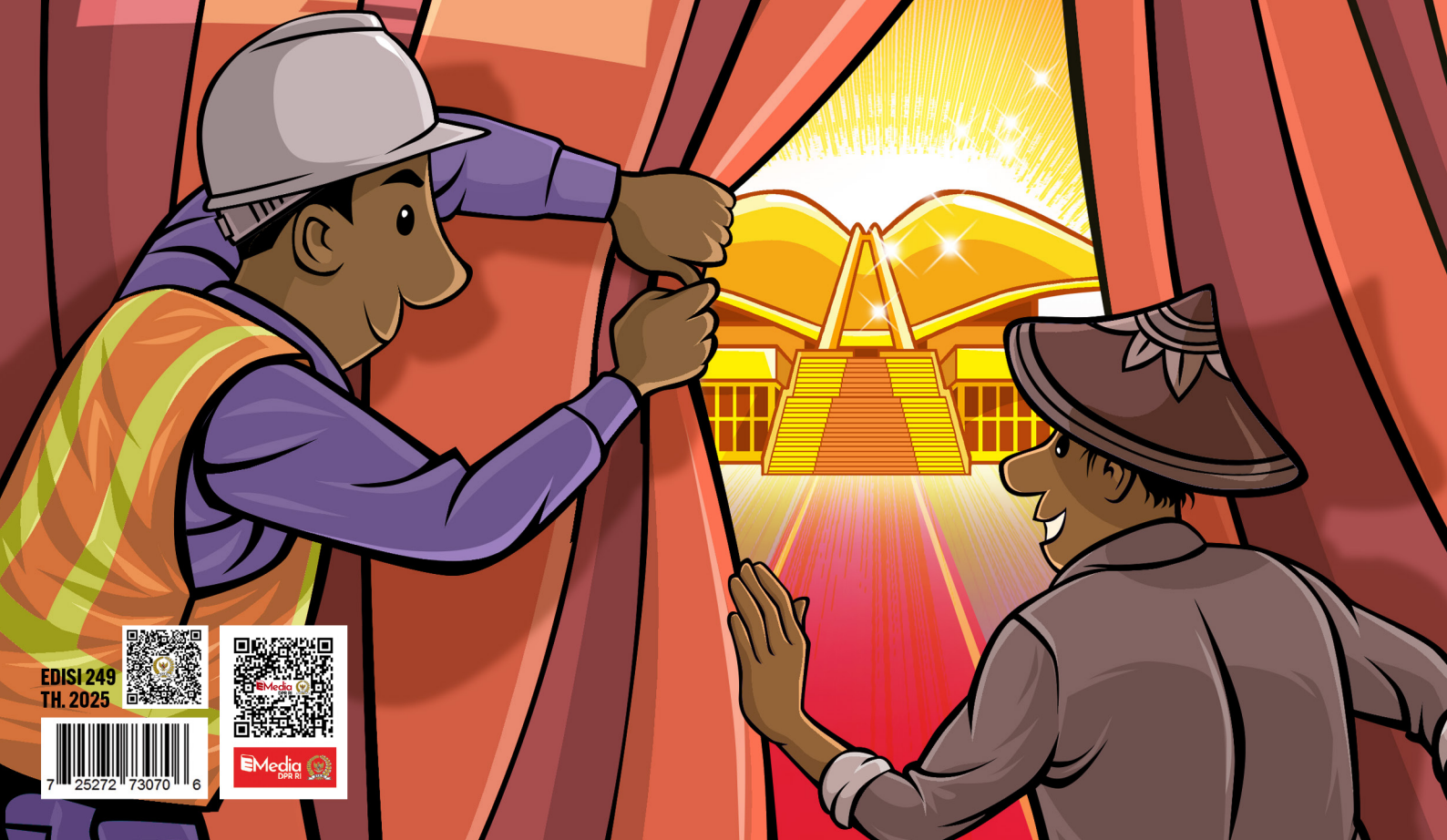


Majalah



PARLEMENTARIA

Transformasi Menuju Parlemen Modern



EDISI 249
TH. 2025



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibnukhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)

Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A. (Kasubag Analis Media)

Wiryawan Narendro Putro, S.Sos, M.A. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Prima Danutirto, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Agung Hidayat, Ridwan Budiman, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Putri Aula Tsabitah, Fadli achmad, Ucha Julistian Mone

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh. Farhan NF, Devi Iriandi, Mario Fernandez, Arifman Efendi, Triana Yulia Sari, Alma Zahra Saputra, Septamares Dwi Santosa, Anggi Yusril Mahendra, Karisma Pretty Sencho Banjarnahor

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Sihahan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayawati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto, Darmawan

PENERBITAN**PIMPINAN PENERBITAN**

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chairudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi), Adi Ardiansyah, MM

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

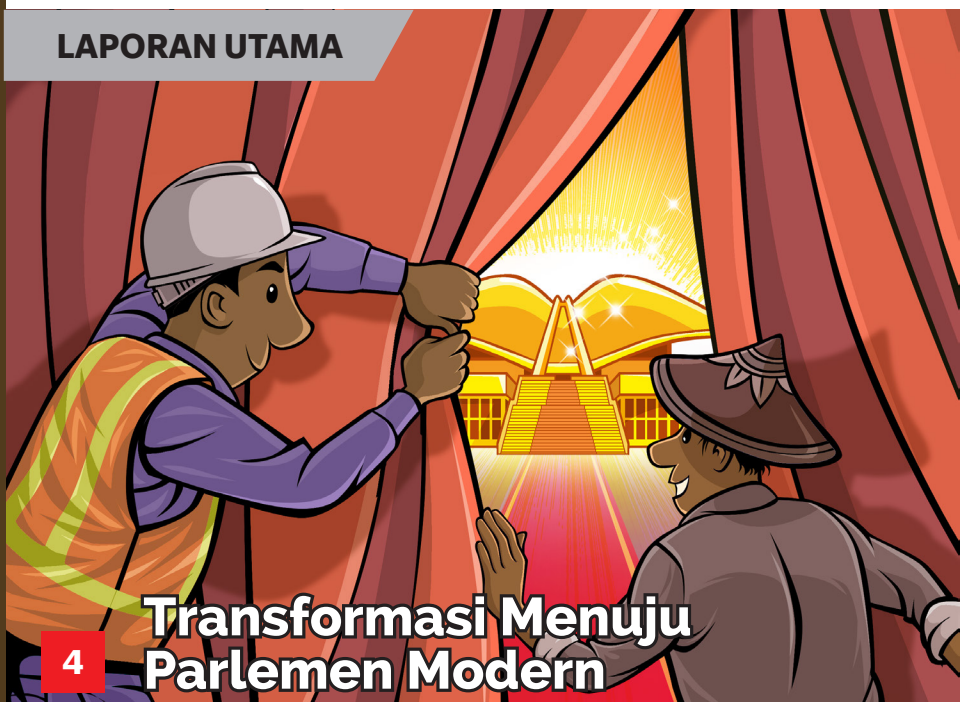
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA



4

Transformasi Menuju Parlemen Modern

4

PROLOG

Transformasi Menuju Parlemen Modern

6

LAPORAN UTAMA

- Wasit Demokrasi, Jaga Keadilan Rakyat
- Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI: Jembatan Rakyat-Parlemen
- Menjadi Penengah di Tengah Perbedaan
- BAKN dan Banggar Kawal Integritas Keuangan Negara

14

SUMBANG SARAN

80 Tahun Indonesia Merdeka: Jejak Positif DPR RI untuk Negeri

18

PENGAWASAN

Kenaikan PBB yang Meresahkan

20

ANGGARAN

TKD Turun, Anggaran untuk Rakyat Justru Meningkat

22

LEGISLASI

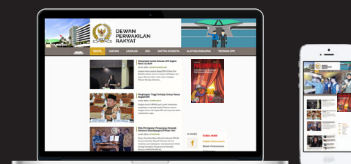
UU Haji

Layanan Jemaah Akan Lebih Terintegrasi

24

FOTO BERITA

28

PROFILMuhamad Nur Purnamasidi
Berpolitik dengan Idealisme

PENGAWASAN



18

**Kenaikan PBB
yang Meresahkan**

SOROTAN



58

**Menstabilkan
Kembali Harga Beras**

LEGISLASI



22

**UU Haji
Layanan Jemaah
Akan Lebih
Terintegrasi**

- 32 KUNKER**
- 58 SOROTAN**
Menstabilkan Kembali Harga Beras
- 60 LIPUTAN KHUSUS**
Indonesia Bersuara, DPR Mendengar
- 62 DAPIL**
- 70 PERNIK**
Menjaga Kondusivitas
dan Produktivitas
- 72 KIAMAT SEHAT**
Tennis Elbow:
Cedera Kecil yang Tak Boleh Dianggap Remeh
- 74 CATATAN DARI AMERIKA**
Dislokasi Elektoral
- 76 LEMSA PARLE**
Menerima Aspirasi Untuk Perubahan Lebih Baik

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri

www.dpr.go.id

PROLOG

Transformasi Menuju Parlemen Modern

DPR RI memperingati usia ke-80 tahun dengan menegaskan transformasi sebagai parlemen modern yang aspiratif, responsif, dan akuntabel. Momentum ini turut menandai peluncuran Rencana Strategis 2025–2029 yang akan menjadi panduan arah DPR RI di tengah dinamika global dan tantangan pembangunan nasional.





KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR RI kini berusaha lebih terbuka terhadap aspirasi publik supaya

mampu menjawab kebutuhan rakyat secara konkret. "Suara rakyat adalah mandat yang kami terima, dan aksi nyata adalah kewajiban yang harus kami lakukan. DPR RI berkomitmen menghadirkan kebijakan yang adaptif dan tangguh dalam menjawab kebutuhan rakyat," ujar Puan.

Transformasi tersebut, sebutnya, diwujudkan melalui Rencana Strategis DPR RI 2025–2029 yang menekankan digitalisasi sistem parlemen, pengelolaan anggaran, serta penguatan diplomasi parlemen. Baginya, modernisasi ini dipandang penting agar DPR bisa menjaga relevansi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan percepatan transformasi digital.

Sejalan dengan arah itu, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustofa, menilai bahwa komitmen DPR RI menindaklanjuti 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi bukti konkret tentang bagaimana DPR modern bekerja. "Pimpinan DPR memutuskan membentuk tim kerja yang melibatkan fraksi-fraksi, alat kelengkapan dewan, serta membuka ruang komunikasi dengan publik untuk membahas tuntutan 17+8 secara transparan," kata Saan.

Langkah legislasi, tuturnya, menunjukkan perkembangan yang lebih cepat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyebutkan bahwa dari 42 RUU Prolegnas Prioritas 2025, 14 RUU telah disahkan menjadi undang-undang. "Lima RUU tengah dibahas di tahap pertama, satu RUU akan

masuk tahap pertama, dan 25 RUU masih dalam proses penyusunan," ucap Bob.

Dirinya juga menambahkan, proses ini tidak hanya soal kuantitas, namun juga soal kualitas, yang mana turut membuka ruang partisipasi publik secara bermakna. "Targetnya tahun ini semuanya harus dibereskan. Tetapi kemudian kita ini namanya *meaningful*. Harus memenuhi *meaningful* partisipasi publik. *Meaningful* itu adalah yang bermakna," ujarnya.

Sebagai informasi, perbandingan dengan periode sebelumnya memperlihatkan kemajuan nyata. Sepanjang tahun 2019–2024, DPR RI mengesahkan sekitar 64 UU dari sejumlah besar target Prolegnas. Persentase ini dinilai masih jauh dari 100 persen, sementara kualitas pembahasan kerap menjadi sorotan publik. Pada tahun 2025, kinerja mulai terlihat lebih fokus dan terukur, dari 41 RUU prioritas, 14 RUU sudah menjadi UU, lima di antaranya sedang dibahas, dan sisanya sedang dalam tahap penyusunan.

Dengan capaian itu, DPR RI ingin meneguhkan wajah parlemen modern yang tidak hanya bekerja dalam ruang legislasi, tetapi juga merawat keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Puan menutup dengan penegasan, "Delapan dekade perjalanan DPR harus menjadi bekal untuk melangkah ke depan lebih kuat, dengan wajah parlemen yang modern, aspiratif, dan berorientasi pada masa depan."

Tantangan globalisasi, digitalisasi, hingga perubahan sosial di masyarakat menuntut parlemen terus beradaptasi. Oleh karena itu, transformasi yang kini dijalankan bukan sekadar simbol perayaan usia ke-80 tahun, melainkan sebuah komitmen untuk menjadikan DPR RI sebagai lembaga legislatif yang mampu bekerja dengan transparan, partisipatif, dan relevan dengan kebutuhan rakyat. 🐾



FOTO: RUNI/VEL

Ketua DPR RI Puan Maharani dalam pidato pembukaan masa persidangan I Tahun 2025-2026 DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Wasit Demokrasi, Jaga Keadilan Rakyat

Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 DPR RI tahun ini menjadi momen refleksi atas peran lembaga legislatif dalam menjalankan amanat konstitusi. Di tengah berbagai dinamika nasional, DPR terus berupaya menjadi penjaga nurani rakyat, memastikan setiap kebijakan yang dibuat berpihak pada keadilan sosial.



KETUA DPR RI Puan Maharani, dalam pidato pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, memaparkan

komitmen DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. Ia mengatakan, DPR bersama pemerintah telah merampungkan pembahasan 14 Rancangan Undang-Undang (RUU). Meski kuantitas penting, Puan menegaskan, kualitas tetap menjadi fokus utama dari produk legislasi yang dihasilkan.

"DPR RI akan selalu memprioritaskan pembentukan UU yang berkualitas, sehingga lebih mengejar kinerja kualitas daripada kuantitas," katanya. Dalam fungsi legislasi, Puan menjelaskan kompleksitas yang dihadapi DPR saat harus berada di tengah berbagai kepentingan. Ia mengibaratkan tugas ini seperti menjadi wasit dalam pertandingan, di mana setiap pihak merasa benar, namun keputusan harus diambil dengan adil dan bijaksana.

"Tapi begitulah demokrasi: ramai, penuh aspirasi, dan harus sabar mendengar sebelum mengetok palu," tambahnya. Di tengah dinamika itu, Puan menekankan bahwa DPR tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebijaksanaan dalam menyusun aturan hukum.

Dalam menyusun undang-undang, DPR juga membuka ruang partisipasi publik secara luas. Menurut Puan, keterlibatan masyarakat merupakan bagian penting dari demokrasi substantif. "Untuk itulah, dalam setiap proses pembentukan undang-undang, partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) merupakan syarat yang sangat penting. Partisipasi ini adalah wujud kedaulatan rakyat," tegas cucu Bung Karno itu.

Bahkan terakhir, DPR RI juga telah mengesahkan Undang-Undang APBN 2024 dan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengesahan UU APBN 2024 tersebut menegaskan komitmen DPR dan pemerintah untuk menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Di samping fungsi legislasi, Puan juga menekankan pentingnya peran pengawasan DPR untuk memastikan pemerintah bekerja efektif. Ia menyoroti berbagai isu aktual yang menjadi perhatian, seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis, penertiban tanah terlantar, hingga pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis.

Puan menegaskan, perhatian DPR tidak terbatas pada isu-isu



Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif,

Puan Maharani
Ketua DPR RI

besar nasional, tetapi juga berasal dari laporan masyarakat yang terus berdatangan ke DPR RI setiap hari. "Harapan rakyat jelas: agar setiap masalah yang mereka hadapi mendapat perhatian dan dapat segera terselesaikan melalui kebijakan negara yang responsif," imbuh perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Sebagai bentuk responsivitas terhadap persoalan rakyat, Puan mengungkapkan bahwa selama setahun terakhir, DPR telah menerima 5,642 laporan dan pengaduan masyarakat, atau sekitar 15 hingga 16 laporan setiap harinya. Setiap laporan tersebut telah ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan dengan rekomendasi kepada pemerintah.

"Tindak lanjut rekomendasi tersebut bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen konstitusional dalam hubungan kemitraan kekuasaan yang sejajar antara lembaga legislatif dan eksekutif," pungkash Puan.

Di masa mendatang, tantangan yang dihadapi bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut persoalan mendasar seperti keadilan sosial, pemerataan pembangunan, dan kedaulatan nasional. "Pendekatan pembangunan bisa berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama: rakyat harus hidup lebih layak, lebih sejahtera, dan lebih bermartabat," ujarnya.

Puan juga menegaskan, DPR bersama pemerintah memegang tanggung jawab konstitusional untuk memastikan setiap kebijakan, baik di bidang hukum, pertahanan, pembangunan, maupun anggaran, dirumuskan secara cermat dan mempertimbangkan risiko jangka pendek maupun panjang. Ia mengingatkan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjadi kompas pembangunan, sehingga "tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi presiden." **bia/mh**

Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Jembatan Rakyat-Parlemen

Sejak diresmikan pada Oktober 2024, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI telah mengambil peran sebagai jembatan penting antara masyarakat dan lembaga legislatif. Dibentuk sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) baru, BAM memiliki tugas utama menampung, menelaah, dan memproses berbagai aspirasi yang datang dari masyarakat agar dapat ditindaklanjuti oleh komisi atau badan terkait di DPR.



KEHADIRAN

BAM menjadi respons DPR terhadap kebutuhan kanal yang lebih terstruktur untuk menampung masukan dari berbagai elemen masyarakat, mulai

dari individu, kelompok, hingga organisasi masyarakat sipil. Selama satu tahun bekerja, berbagai aspirasi masyarakat ditampung dan ditindaklanjuti melalui BAM. Salah satunya aspirasi Ojol (Ojek Online) yang menyuarakan aspirasi mereka soal potongan biaya layanan aplikasi sebesar 20 persen yang dinilai terlalu berat, terutama di

tengah biaya hidup yang kian tinggi.

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan mengatakan aspirasi yang disampaikan para pengemudi wajar, karena beban potongan saat ini cukup besar setelah ditambah dengan iuran jaminan sosial. Heryawan menyampaikan BAM akan segera mengundang pihak aplikator, kementerian terkait, serta BPJS



FOTO: JAKA/VEL

Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (✓) saat menerima aspirasi tuntutan Aliansi Pengemudi Online Bersatu (APOB) di Kompleks Parlemen.



FOTO: MARIO/VEL

Anggota BAM DPR RI Andre Rosiade (✓) saat menerima aspirasi dari Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) di Gedung Nusantara II, Rabu (3/9/2025).

Ketenagakerjaan untuk membahas solusi.

BAM tidak tinggal diam. Aher, begitu ia akrab disapa, menjanjikan aspirasi itu akan diteruskan ke pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Sufmi Dasco Ahmad, belakangan sudah angkat suara. Mereka sepakat bahwa pengemudi online tak bisa terus dibiarkan bekerja tanpa payung hukum yang jelas.

Ada dua jalan yang kini dibicarakan di Senayan. Pertama, penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai solusi cepat untuk memastikan adanya jaminan sosial, terutama terkait kecelakaan kerja. Beban iuran BPJS yang relatif murah, sekitar Rp16.800 per bulan, disebut bisa ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, daerah, dan mitra driver. Kedua, memasukkan perlindungan pekerja ojol dalam revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau bahkan merancang undang-undang khusus pekerja platform, mencontoh Malaysia dan Singapura.

BAM memang dibentuk untuk menjadi jembatan antara rakyat dan parlemen. Tapi dalam kasus ini, peran mereka lebih dari sekadar

menyalurkan suara. Mereka ikut menguji komitmen DPR: apakah benar lembaga legislatif berpihak pada masyarakat luas, ataukah hanya menjadikan keluhan ojol sebagai headline musiman.

Selain isu Ojol, BAM juga menegaskan komitmen DPR untuk selalu membuka diri terhadap aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa. Anggota BAM Andre Rosiade misalnya, bertemu dan berdialog langsung dengan mahasiswa, hingga aktivis influencer yang menyuarakan aspirasi.

Dengan mahasiswa, berbagai masukan konstruktif dari DPP GMNI, termasuk kajian strategis yang akan diserahkan ke pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti. "Kajian ini akan kami teruskan kepada seluruh alat kelengkapan dewan dan komisi, agar menjadi bahan perbaikan kinerja DPR ke depan. Tujuannya, DPR semakin baik dalam melayani rakyat," jelas legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, saat menemui aktivis influencer yang menyuarakan tuntutan soal 17+8 Indonesia Berbenah di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Andre bersama

Anggota DPR Rieke Diah Pitaloka langsung menerima aspirasi dan tuntutan publik tersebut. "Saya usul, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan diserahkan ke badan aspirasi juga, jadi lebih baik diserahkan langsung ke kami," ucap Andre.

Ia pun berjanji setelah mendapat berbagai aspirasi dari masyarakat, DPR akan berbenah menjadi lebih baik. "Insyaallah kita akan membuat transformasi ke depan menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat untuk pemerintah sekarang," kata Andre.

Dengan berbagai langkah nyata ini, BAM DPR RI berupaya membuktikan bahwa keberadaannya bukan sekadar formalitas, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan setiap suara rakyat, dari yang paling lantang hingga yang paling terpinggirkan, mendapatkan perhatian serius dari parlemen. Ke depan, efektivitas BAM akan diuji dari seberapa jauh aspirasi yang mereka terima dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret yang membawa perubahan positif bagi masyarakat luas. bina/mh

Menjadi Penengah di Tengah Perbedaan



Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Sidang Bersama DPR-DPRD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8/2025).



FOTO: RUNI/VEL

Membentuk undang-undang seringkali seperti wasit dalam sebuah pertandingan. Ada majikan dan pekerja, pengusaha dan konsumen, pemerintah dan rakyat-semua dengan kepentingan masing-masing. Ketika DPR RI mengetok palu, hampir pasti ada pihak yang mendukung dan ada pula yang menolak.



NAMUN, di situlah letak esensi demokrasi. Ramai, penuh aspirasi, dengan suara pro dan kontra yang justru

memperkaya perumusan kebijakan. Tugas DPR RI adalah menjaga keseimbangan agar setiap norma hukum yang lahir adil, bijaksana, dan berpihak pada kepentingan bangsa.

"Tanggung jawab utama pembentuk undang-undang adalah bersikap adil dan bijaksana dalam merumuskan norma hukum yang mengatur hubungan-hubungan tersebut," demikian Ketua DPR RI Puan Maharani memberi pandangan dalam pidatonya pada Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, pertengahan Agustus silam.

Dalam setiap proses legislasi, DPR RI memandang penting partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*). Konstitusi mengamanatkan agar hukum menjadi instrumen keadilan bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok.

Melibatkan masyarakat sejak tahap awal pembahasan RUU adalah bentuk nyata dari kedaulatan rakyat. Dengan membuka ruang dialog, mendengar, dan menimbang aspirasi, produk hukum yang lahir akan lebih *legitimate*, memiliki keadilan, serta diterima publik dengan lebih baik.

Untuk menjaring pandangan dan partisipasi publik dalam perumusan UU, DPR selalu menggelar pertemuan dengan para akademisi kampus, tokoh masyarakat, komunitas, organisasi profesi, dan para pemangku kepentingan lainnya ke berbagai daerah lewat kunjungan kerja. Tujuannya ingin mendapatkan perspektif lain untuk kebutuhan penyusunan suatu UU.

Sebagai dapur legislasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sudah menghasilkan banyak produk UU. Yang fenomenal adalah UU Haji yang sudah disahkan pada Agustus silam. UU ini mengamanatkan pembentukan kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umrah. Tak hanya itu, DPR RI juga sedang menyiapkan RUU KUHAP yang tidak lama lagi segera disahkan. Kelak Indonesia memiliki KUHAP baru yang lebih adil daripada KUHAP lama peninggalan pemerintah kolonial.

Inilah HUT ke-80 DPR RI sebagai momentum untuk memperkuat tekad, agar kerja legislasi semakin berkualitas. DPR RI menyadari bahwa UU yang baik bukan sekadar memenuhi target jumlah, melainkan mampu menjawab tantangan zaman, melindungi hak rakyat, dan membawa manfaat nyata bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan kerja bersama, partisipasi publik, dan semangat demokrasi, DPR RI berkomitmen melanjutkan perjalanan legislasi menuju Indonesia yang lebih adil, maju, dan berdaulat.

gal/mh

BAKN dan Banggar Kawal Integritas Keuangan Negara

Memasuki usia ke-80 tahun, DPR RI mengawal kebijakan pengelolaan keuangan negara dengan dua 'jangkar' sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dua jangkar itu ialah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI yang memastikan temuan audit BPK ditindaklanjuti dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang mengawal arah fiskal negara seperti asumsi makro, postur RAPBN, dan evaluasi realisasi APBN.



WALAUPUN kedua jangkar ini berbeda fungsi, masing-masing bekerja dalam satu tarikan napas yakni memastikan setiap rupiah

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terserap secara transparan, akuntabel, dan memberi manfaat nyata. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), BAKN DPR RI berfungsi menelaah hasil pemeriksaan BPK, menyampaikan hasil telaahan kepada komisi terkait dan mengawasi tindak lanjut rekomendasi audit.

Sejak dibentuk, BAKN menjadi semacam "jembatan" antara lembaga audit eksternal (BPK) dan DPR sebagai lembaga legislatif. Jika BPK menghasilkan temuan audit, maka BAKN bertugas memastikan temuan tersebut tidak berhenti di atas kertas, melainkan ditanggapi oleh DPR RI maupun eksekutif. Dalam beberapa tahun terakhir, BAKN aktif mengangkat isu-isu krusial, mulai dari keterlambatan penyetoran PNPB hingga pungutan yang tidak memiliki



Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo (tengah).

dasar regulasi.

Temuan tersebut kemudian menjadi masukan penting bagi komisi terkait dan Banggar dalam menyusun postur APBN. Selain rapat dengar pendapat, BAKN juga melakukan kunjungan kerja ke kementerian, lembaga, dan BUMN untuk memastikan hasil audit ditindaklanjuti. Pekerjaan BAKN tidak

tanpa kendala. Keterbatasan akses data, seperti ringkasan kerugian negara (PKKN), kerap menghambat kinerja. Walaupun begitu, BAKN tetap berupaya memperkuat transparansi melalui publikasi laporan kinerja secara berkala.

Langkah ini menjadi catatan positif di tengah meningkatnya tuntutan publik atas keterbukaan



Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah.

informasi. Bagi Ketua BAKN DPR RI Andreas Eddy Susetyo, peran Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dipimpinnya bukan sekadar menelaah laporan audit, tetapi juga mengawal agar hasilnya benar-benar membawa dampak.

"Kami di BAKN memastikan temuan BPK tidak berhenti di atas kertas. Tugas kami adalah mendorong tindak lanjut, agar uang rakyat benar-benar kembali dan dikelola dengan benar. Ini bagian dari tanggung jawab DPR menjaga akuntabilitas negara," tegas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

BAKN DPR RI mencatat sejumlah capaian penting dalam pengawasan keuangan negara sepanjang lima tahun terakhir. Lembaga ini menyoroti isu strategis, mulai dari potensi kebocoran penerimaan negara hingga peningkatan transparansi laporan. Salah satu sorotan utama BAKN adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). BAKN menemukan ada potensi kebocoran penerimaan negara akibat pungutan yang tidak memiliki dasar hukum jelas. Hasil telaahan tersebut telah disampaikan kepada komisi teknis dan mendapat perhatian pemerintah.

Dalam hal pengawasan terhadap

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BAKN melakukan kunjungan kerja serta rapat dengan jajaran direksi untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Fokus pengawasan mencakup penyertaan modal negara, persoalan inefisiensi, hingga piutang macet.

Capaian lainnya adalah peningkatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit BPK. BAKN mendorong kementerian dan lembaga agar mempercepat penyelesaian rekomendasi, sehingga tingkat penyelesaian meningkat dari sekitar 68 persen pada 2019 menjadi 76 persen pada 2024.

Selain itu, BAKN mulai membuka hasil telaahan laporan kepada publik. Usaha ini dinilai sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi yang sebelumnya jarang dilakukan. Andreas menegaskan, pengawasan yang dilakukan bukan semata formalitas, melainkan untuk memastikan uang negara digunakan tepat sasaran.

"Kami tidak ingin hasil audit BPK hanya berhenti di laporan. BAKN hadir untuk memastikan rekomendasi ditindaklanjuti dan ada perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara," ujarnya.

Jika BAKN mengawal hasil audit, maka Banggar berada di sisi lain. Banggar DPR RI menegaskan perannya sebagai mitra utama pemerintah dalam penyusunan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai UU MD3, Banggar bertugas membahas kebijakan fiskal, rencana kerja pemerintah, serta postur RAPBN dan APBN Perubahan bersama Kementerian Keuangan.

Pada Juli 2025, Banggar telah menyelesaikan pembahasan empat panitia kerja utama, yakni asumsi makro, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini kemudian menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026 yang telah disampaikan ke rapat paripurna.

Selain itu, Banggar juga menuntaskan pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN 2024. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, menegaskan delapan fraksi DPR kompak menyetujui rancangan tersebut pada tingkat pertama, menandai komitmen kolektif terhadap akuntabilitas fiskal.

"Delapan fraksi di DPR kompak menyetujui Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban APBN 2024. Ini adalah bukti komitmen bersama menjaga akuntabilitas fiskal. Bukan hanya soal angka serapan, tapi juga dampak nyata bagi rakyat," ungkap politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Di sisi lain, Banggar juga mengingatkan pemerintah mengenai risiko defisit anggaran. Pada semester I 2024, defisit APBN berpotensi mencapai 2,7 persen terhadap PDB. Banggar merekomendasikan pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk mengurangi ketergantungan pada utang.

Tak hanya itu, Banggar menekankan pentingnya kualitas belanja negara. Bagi Said, belanja negara harus memberi manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar mengejar angka serapan.

um/mh



Tahun DPR RI

Tahun 2025 menjadi tonggak penting bagi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang genap berusia 80 tahun. Sejak lahir dari rahim kemerdekaan pada 1945, lembaga legislatif ini telah menapaki perjalanan panjang penuh dinamika. Dari masa revolusi, demokrasi terpimpin, orde baru, hingga era reformasi, DPR RI senantiasa bertransformasi, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, sekaligus menjaga hakikatnya sebagai wakil rakyat. Setiap periode membawa cerita dan tantangan tersendiri, yang membentuk sejarah DPR RI hingga menjadi seperti sekarang.

SEJARAH SINGKAT DPR RI

1. AWAL BERDIRINYA

1945: Setelah Proklamasi, lahirlah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang menjalankan fungsi legislatif sementara. KNIP menjadi cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

2. PERKEMBANGAN ERA DEMOKRASI

1950: DPR hasil Pemilu pertama Indonesia dibentuk (1955). Masa demokrasi parlementer: DPR memiliki peran sangat kuat dalam mengontrol pemerintah.

3. ERA ORDE BARU

1966–1998: DPR berperan sebagai lembaga tinggi negara, tetapi pengawasan terhadap eksekutif terbatas. Fungsi DPR lebih banyak difokuskan pada pengesahan program pemerintah.

4. REFORMASI 1998

Setelah reformasi, UUD 1945 diamandemen (1999–2002). DPR semakin kuat dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ditetapkan sebagai lembaga negara yang sejajar dengan presiden.

5. DPR SAAT INI

Keanggotaan: 580 anggota dari berbagai partai politik hasil pemilu. Masa jabatan: 5 tahun.

FUNGSI UTAMA: LEGISLASI, ANGGARAN, DAN PENGAWASAN.

Dengan semangat baru, DPR RI berkomitmen memperkuat peran dalam menjaga demokrasi. Legislasi, anggaran, dan pengawasan bukan hanya formalitas, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya ini, DPR RI kini memiliki alat kelengkapan dewan yang terdiri dari 13 komisi dan 7 Badan. Penambahan ini untuk mendukung kerja DPR RI sebagai lembaga legislatif terkuat dalam sinergi dengan eksekutif yang makin luas.

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

13 KOMISI

- Komisi I
- Komisi II
- Komisi III
- Komisi IV
- Komisi V
- Komisi VI
- Komisi VII
- Komisi VIII
- Komisi IX
- Komisi X
- Komisi XI
- Komisi XII
- Komisi XIII

7 BADAN

- Badan Legislasi
- Badan Anggaran
- Badan Urusan Rumah Tangga
- Badan Kerjasama Antar-Parlemen
- Badan Akuntabilitas Keuangan Negara
- Badan Aspirasi Masyarakat
- Mahkamah Kehormatan Dewan

14 RUU RAMPUNG, AWAL PERIODE

Pada tahun pertama periode 2024–2029, DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 14 RUU. Capaian ini menunjukkan konsistensi DPR RI dalam menegakkan komitmen legislasi sejak awal periode.

41 RUU PROLEGNAS PRIORITAS 2025

DPR RI terus membuktikan perannya sebagai lembaga legislatif yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan bangsa. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut tercermin dalam penetapan 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2025. DPR RI menegaskan bahwa setiap regulasi yang disusun bukan sekadar memenuhi target kuantitas, melainkan harus memiliki kualitas tinggi, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan zaman.

14 RUU DIKETOK SAH DALAM PARIPURNA

- Komisi II = 10 UU Kabupaten/Kota yang disahkan sebagai wujud perhatian DPR RI terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik (19/11/2024)
 1. Undang-Undang tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
 2. Undang-Undang tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
 3. Undang-Undang tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
 4. Undang-Undang tentang Kabupaten Kolaka di Sulawesi Tenggara
 5. Undang-Undang tentang Kabupaten Konawe di Sulawesi Tenggara
 6. Undang-Undang tentang Kabupaten Muna di Sulawesi Tenggara
 7. Undang-Undang tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
 8. Undang-Undang tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
 9. Undang-Undang tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
 10. Undang-Undang tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
- Komisi VI = UU BUMN (4/2/2025)
- Badan Legislasi = UU Minerba (18/2/2025)
- Komisi I = UU TNI (20/3/2025)
- Badan Legislasi = UU tentang perubahan UU No. 2 Tahun 2024 mengenai Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) (24/7/2025)

Delapan puluh tahun sudah Indonesia berdiri sebagai negara merdeka. Usia yang tidak lagi muda ini menghadirkan pertanyaan reflektif: sudahkah bangsa ini benar-benar merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Merdeka bukan hanya dari penjajahan fisik, tetapi juga merdeka dalam akses kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta suara politik yang dihargai. Dalam kerangka itulah, capaian positif DPR RI setahun terakhir menjadi penting untuk kita soroti, apalagi di tengah momentum HUT ke-80 Republik Indonesia.

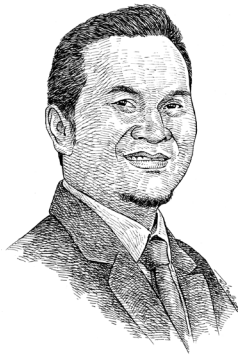
Kemerdekaan sejati tercermin dalam kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang merata, ekonomi yang berkeadilan, serta politik yang partisipatif. DPR RI berdiri sebagai salah satu pilar demokrasi yang mengemban amanat besar untuk memastikan cita-cita tersebut tidak hanya tertulis di dalam konstitusi, tetapi juga hadir dalam keseharian rakyat. DPR RI, sebagai lembaga legislatif sekaligus representasi rakyat, sering menjadi sorotan dan kritik. Namun, di balik berbagai polemik, setahun terakhir terdapat sejumlah capaian positif yang patut diapresiasi.

Capaian ini tidak hanya menunjukkan kerja DPR dalam menjalankan tiga fungsi utamanya—legislasi, anggaran, dan pengawasan—tetapi juga memperlihatkan usaha nyata memperkuat demokrasi dan menjawab kebutuhan rakyat.

1. Legislasi yang Menyentuh Kepentingan Publik

Fungsi legislasi DPR kerap menjadi indikator utama kinerja. Dalam setahun terakhir, beberapa produk hukum penting berhasil disahkan, yang membawa dampak langsung pada kehidupan rakyat.

- UU Kesehatan: Menjadi tonggak baru reformasi sektor kesehatan, dengan tujuan memperluas



80 Tahun Indonesia Merdeka: Jejak Positif DPR RI untuk Negeri

Oleh:

Asep Kamaluddin Nashir

Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta

akses, meningkatkan mutu layanan, dan memperkuat tenaga kesehatan di seluruh daerah. UU Kesehatan menjadi respons terhadap pelajaran pahit pandemi. Krisis global itu menunjukkan bahwa sistem kesehatan nasional rapuh tanpa regulasi yang kokoh. Melalui undang-undang ini, akses diperluas hingga ke daerah terpencil, tenaga medis diperkuat, dan mutu layanan ditingkatkan. Argumennya sederhana: bangsa yang sehat adalah fondasi dari kemerdekaan yang sesungguhnya.

- UU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET): Menandai keberanian DPR mendorong transisi energi. Dunia bergerak cepat menuju ekonomi hijau. Negara yang lambat beradaptasi akan tertinggal. Regulasi EBET memberi kepastian hukum bagi investor, memperkuat strategi dekarbonisasi, dan membuka peluang kerja baru di sektor energi bersih. Dengan demikian, DPR tidak hanya menyusun norma, tetapi juga membuka jalan menuju kemandirian energi nasional.
- UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Memberikan payung hukum lebih kuat bagi jutaan pekerja migran yang kerap menghadapi kerentanan di luar negeri.

Capaian legislasi ini menegaskan bahwa DPR tidak hanya menghasilkan aturan, tetapi juga berusaha menyesuaikan diri dengan tantangan zaman: digitalisasi, krisis energi, hingga kebutuhan perlindungan sosial. UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga hadir pada saat yang tepat. Jutaan pekerja migran adalah pahlawan devisa. Namun, tanpa perlindungan hukum yang kuat, mereka rentan eksploitasi. Regulasi baru memastikan hak mereka lebih terjamin, sekaligus menegaskan posisi negara sebagai pelindung warganya di manapun mereka berada. Legislasi ini mengandung pesan politik yang jelas: kemerdekaan tidak mengenal batas geografis.

2. Fungsi Anggaran: Menjaga Stabilitas, Mendorong Keberpihakan

Setahun terakhir, DPR juga menunjukkan langkah positif dalam fungsi anggaran. Bersama pemerintah, DPR menyetujui dan mengawasi APBN agar tetap sehat secara makro, sekaligus berpihak pada kelompok rentan. Keseimbangan antara menjaga stabilitas fiskal dan memastikan APBN tetap pro-rakyat adalah capaian positif yang perlu diapresiasi.

APBN adalah wajah politik kebijakan. DPR bersama pemerintah berperan menjaga keseimbangan

antara stabilitas fiskal dan keberpihakan sosial. Subsidi energi misalnya, bukan hanya angka dalam tabel anggaran, melainkan wujud keberpihakan pada rakyat kecil. Tanpa subsidi, gejolak harga global akan langsung menghantam dapur rumah tangga.

Alokasi besar untuk pendidikan memperlihatkan orientasi jangka panjang. Generasi emas 2045 bukan sekadar slogan, tetapi proyek peradaban.

Investasi pendidikan adalah cara paling efektif mengurangi kesenjangan dan membekali anak muda menghadapi persaingan global.

Dukungan anggaran bagi UMKM dan start-up digital memperlihatkan keberanian DPR membaca arah ekonomi baru. Di tengah disrupsi teknologi, sektor digital menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus wadah kreativitas anak bangsa. Dukungan fiskal ini membuktikan bahwa DPR tidak sekadar mengawal masa kini, tetapi juga menyiapkan masa depan.

3. Fungsi Pengawasan: Menjadi Penjaga Kepentingan Rakyat

Pengawasan DPR sepanjang tahun terakhir menunjukkan peningkatan substansi. Bansos yang rawan manipulasi politik diawasi ketat agar tepat sasaran. Stabilitas pangan dipantau cermat karena harga beras atau minyak goreng bukan sekadar soal ekonomi, melainkan soal stabilitas sosial.

Pemantauan terhadap transisi energi juga menegaskan keseriusan DPR memastikan janji internasional Indonesia benar-benar dilaksanakan. Target Net Zero Emission 2060 hanya bisa dicapai jika pengawasan melekat dilakukan. Tanpa peran DPR, komitmen itu berisiko berubah menjadi retorika.

DPR juga lebih aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan setahun terakhir. Beberapa langkah positif terlihat dari:

- Pengawasan ketat program

bantuan sosial, agar lebih tepat sasaran dan bebas dari penyalahgunaan politik.

- Kontrol atas isu pangan, terutama menjelang tahun politik, untuk menjaga harga tetap stabil.
- Pemantauan transisi energi, memastikan komitmen global Indonesia tidak sekadar jargon, tetapi benar-benar diimplementasikan.

Walau tantangan pengawasan masih besar, langkah-langkah ini menunjukkan DPR berusaha hadir lebih substantif dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai mandat rakyat.

4. Diplomasi Parlemen: Wajah Demokrasi Indonesia di Dunia

Kontribusi DPR dalam diplomasi internasional sering tidak terlihat oleh publik, padahal dampaknya signifikan. Kehadiran di forum Inter-Parliamentary Union (IPU) membawa pesan bahwa Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global. DPR menyuarakan perdamaian, keadilan ekonomi, hingga kolaborasi energi lintas negara. Diplomasi ini memperkuat diplomasi eksekutif, sehingga citra Indonesia semakin solid sebagai negara demokrasi besar yang aktif membangun tata dunia yang adil. Langkah ini memperkuat citra Indonesia sebagai negara demokrasi besar yang tidak hanya fokus pada urusan domestik, tetapi juga aktif mendorong agenda-agenda strategis di panggung dunia.

5. Reformasi Internal: Transparansi dan Digitalisasi

Reformasi internal DPR tidak kalah penting dari fungsi-fungsi utama. Pemanfaatan teknologi digital memperluas akses publik terhadap agenda rapat, draf RUU, dan hasil legislasi. Transparansi berbasis teknologi menepis stigma lama bahwa DPR tertutup. Langkah ini bukan hanya memenuhi tuntutan modernisasi, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini rapuh. Ini adalah capaian

positif dalam membangun kembali kepercayaan rakyat, yang selama ini sering menurun akibat stigma negatif terhadap lembaga legislatif.

Membaca Jejak Sejarah, Menyongsong Masa Depan

Jika menoleh ke belakang, perjalanan DPR tidak selalu mulus. Kritik terhadap kualitas legislasi, partisipasi publik, dan etika politik terus bergema. Namun, sejarah politik Indonesia memperlihatkan bahwa demokrasi selalu tumbuh melalui dialektika antara kritik dan perbaikan. DPR dalam setahun terakhir membuktikan kesediaannya untuk berbenah, meskipun jalan panjang masih terbentang.

Masa depan menghadirkan tantangan yang tak kalah berat. Transformasi digital, perubahan iklim, dan dinamika geopolitik menuntut DPR untuk lebih adaptif dan responsif. Legislasi harus semakin berbasis data, anggaran semakin tepat sasaran, pengawasan lebih tegas, diplomasi lebih cerdas, dan reformasi internal semakin konsisten.

Refleksi HUT ke-80 RI: Dari Kritik Menuju Apresiasi

Tentu, DPR RI tidak lepas dari kritik. Masih ada pekerjaan rumah: meningkatkan kualitas legislasi, memperkuat partisipasi publik, hingga menegakkan etika politik. Namun, di balik itu semua, capaian positif dalam setahun terakhir menunjukkan bahwa DPR tetap berusaha hadir sebagai penjaga aspirasi rakyat.

Momentum HUT ke-80 RI menjadi refleksi bersama: kemerdekaan tidak hanya berarti terbebas dari penjajah, tetapi juga tercermin dalam lembaga negara yang bekerja sungguh-sungguh untuk rakyatnya. Capaian positif DPR adalah bagian dari ikhtiar panjang menuju demokrasi yang lebih matang. 🌱

Kenaikan PBB yang Meresahkan

Fenomena kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah belakangan memicu gelombang protes warga, yang dilakukan lewat demonstrasi besar-besaran. Salah satunya yang terjadi di Kabupaten Pati.

Warga turun ke jalan menyuarakan keberatan. Mereka menolak kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250 persen pada tahun 2025. Tentu tidak hanya Pati, kenaikan PBB hingga 250 bahkan hingga 300 persen juga menjadi isu yang mencuat di berbagai daerah lainnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, keresahan masyarakat tersebut menjadi sebuah

“

Keresahan masyarakat tersebut menjadi sebuah alarm politik bagi pemerintah dan DPR RI

Aria Bima
Wakil Ketua Komisi II DPR RI



FOTO: MUNCHEN/VEL

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima.

alarm politik bagi pemerintah dan DPR RI. Bahkan, isu tersebut menjadi potret nyata interaksi kebijakan fiskal dengan kehidupan rakyat. Dan Komisi II sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya tanggung jawab memastikan kebijakan berjalan proporsional, dimana kemandirian fiskal tetap tercapai, tetapi keadilan sosial tak diabaikan.

Sebab Musabab

Kenaikan PBB-P2 ini tentu tidak lahir tiba-tiba. Ada hal yang melatarbelakanginya, mulai dari landasan hukum yang menopang seperti UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) hingga Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018.

Anggota Komisi II DPR RI M. Khozin sempat mengungkapkan bahwa kenaikan tarif PBB-P2 secara tidak langsung merupakan imbas pemberlakuan UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD). Disebutkan dalam

Pasal 41 ayat (2), mengubah batas maksimum tarif PBB-P2 dari 0,3% menjadi 0,5%. Dengan kata lain, Pemda memiliki ruang lebih besar untuk menaikkan tarif jika dipandang perlu.

Bahkan, hal itu juga dipicu oleh penundaan penyesuaian tarif pajak di daerah yang tengah berlangsung bertahun-tahun. Akibatnya, saat

kebijakan baru diberlakukan, lonjakan tarif menjadi sangat tinggi. Selain itu, lonjakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang didasarkan pada penilaian tim appraisal yang kerap tidak sesuai kenyataan di lapangan. Sehingga, politisi Fraksi PKB ini juga menilai bahwa kenaikan PBB-P2 ini sebagai langkah atau ikhtiar untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Jadi, pemicunya cukup beragam di tiap-tiap daerah. Kenaikan PBB-P2 sebagai ikhtiar untuk menaikkan PAD di masing-masing daerah untuk kepentingan belanja di daerah," ujar Khozin. Senada dengan Khozin, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK

“

Lonjakan PBB-P2 di berbagai daerah ini dipicu dua faktor utama, yakni pemangkasan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, serta tuntutan kemandirian fiskal pasca diberlakukannya UU HKPD.

Amin AK
Anggota Komisi XI DPR RI

PBB-P2 menjadi respons fiskal, tetapi solusi berkelanjutan harus diutamakan melalui kolaborasi pusat-daerah dan pengoptimalan pendapatan asli

"Pertama, karena dana dari pemerintah pusat enggak ada. Praktis enggak ada, karena penghematan kemarin itu, kan," ujar Agus. Itulah



Anggota Komisi II DPR RI M. Khozin.



Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK.

menilai, lonjakan PBB-P2 di berbagai daerah ini dipicu dua faktor utama, yakni pemangkasan signifikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat, serta tuntutan kemandirian fiskal pasca diberlakukannya UU HKPD.

"Pemotongan DAU sebesar Rp15,67 triliun pada 2025 dari pagu awal Rp446,63 triliun memberikan tekanan besar bagi daerah. Kenaikan

daerah (PAD),"ungkap Amin.

Sementara menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio yang dilansir Kompas.com 15 Agustus 2025 mengatakan bahwa faktor utama yang membuat tarif PBB melonjak tidak lain karena kebijakan efisiensi yang diambil oleh pemerintah pusat, sehingga dana dari pemerintah pusat ke daerah berkurang.

yang kemudian membuat tidak ada dana pembangunan atau kegiatan lain. Pasalnya, diperkirakan 50 persen anggaran daerah sudah habis digunakan untuk menggaji pegawai. Sehingga, cara praktis untuk mendapatkan dana bagi daerah-daerah adalah dengan menaikkan tarif PBB-P2. Namun, kepala daerah tidak memikirkan risikonya terhadap masyarakat. — ayu/mh

Muhidin menjelaskan bahwa re-alokasi dana ini merupakan arahan Presiden Prabowo agar belanja negara lebih efektif menyasar kebutuhan masyarakat. "Kalau kita lihat, dana ke daerah itu memang berkurang dalam bentuk TKD, tetapi sesungguhnya lebih besar karena dialihkan langsung ke program-program yang menyentuh rakyat kecil," ujar Muhidin saat diwawancarai Parlemen, akhir Agustus lalu.

Ia mencontohkan, program MBG sendiri memiliki alokasi mencapai Rp335 triliun yang langsung didistribusikan ke daerah, tanpa melalui pemerintah kabupaten/kota. Begitu pula pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, hingga pengairan, yang tetap besar dan langsung dirasakan masyarakat. Muhidin menyinggung pentingnya pendapatan asli daerah (PAD) dalam menopang kemandirian daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu hati-hati dalam menetapkan kebijakan pajak agar tidak membebani rakyat. "Kenaikan PBB kemarin di beberapa daerah terjadi bukan tanpa alasan, karena nilai objek pajak juga naik. Tapi harus ada sosialisasi agar masyarakat tidak kaget," jelas legislator Fraksi Partai Golkar dapil Sulteng ini.

Muhidin menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana daerah, terutama ketika sebagian besar anggaran kini masuk dalam kerangka program nasional. DPR, kata dia, akan mendorong pemerintah pusat dan daerah saling berkoordinasi, sehingga realisasi belanja benar-benar tepat sasaran. "Kita ingin pertumbuhan yang lebih bagus. Maka, kontrol pusat dan daerah harus berjalan bersama agar program pemerintah betul-betul sampai ke masyarakat," pungkasnya.

Pemotongan anggaran TKD sebesar Rp269 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan



Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad.

TKD Turun, Anggaran untuk Rakyat Justru Meningkatkan

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhidin Mohamad, menegaskan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN tahun depan memang mengalami penurunan, namun anggaran tersebut tidak hilang begitu saja. Menurutnya, dana tersebut dialihkan ke berbagai program prioritas nasional yang justru langsung menyentuh masyarakat di daerah, mulai dari program Makan Bergizi (MBG), pembangunan sekolah rakyat, kesehatan gratis, hingga peningkatan layanan rumah sakit.

dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dipastikan tidak akan menghambat laju pembangunan di daerah. Anggota Banggar DPR RI Abdul Fikri Faqih, memastikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan total dana sebesar Rp1.376,9 triliun melalui program-program prioritas yang akan langsung menyentuh masyarakat.

Menurut Fikri, alih-alih mengalir melalui kas daerah, dana pembangunan kini dialokasikan ke berbagai program strategis yang dikelola langsung oleh kementerian dan lembaga di pusat. Langkah ini diambil untuk menjaga kesejahteraan masyarakat tetap aman.

"Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah," ungkap Fikri dalam keterangan tertulis kepada Parleментарaria, Agustus silam. Ia merinci beberapa program prioritas yang akan dijalankan. Di sektor bantuan sosial, tersedia alokasi besar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28,7 triliun, Kartu Sembako (BPNT) Rp43,8 triliun, dan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp69 triliun.

Sektor pendidikan dan kesejahteraan juga mendapat perhatian serius, termasuk Program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun, PIP/KIP kuliah/beasiswa lainnya Rp63,6 triliun, serta Dana Pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda Rp27,9 triliun. Selain itu, sektor



FOTO: ARIEF/VEL

Anggota Banggar DPR RI Abdul Fikri Faqih.

infrastruktur dan pemerataan juga tidak luput dari perhatian. Pemerintah mengalokasikan dana untuk Preservasi Jalan dan Jembatan sebesar Rp24,3 triliun, Perumahan Rp48,7 triliun, dan Bendungan serta Irigasi senilai Rp12 triliun.

Bantuan lainnya juga disiapkan, seperti subsidi energi dan kompensasi Rp381,3 triliun, subsidi non energi

termasuk pupuk dan KUR Rp108,8 triliun, serta program lumbung pangan Rp22,4 triliun. Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, program-program ini akan memastikan masyarakat tidak merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran TKD. Ia juga menyoroti adanya upaya pemerataan yang lebih adil. Berdasarkan data yang dihitung, unit cost per kapita di Papua jauh lebih tinggi dibanding di Jawa.

"Tadi sudah dihitung angkanya per kapita. Jadi, setiap orang, kalau ada kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa, bahkan tadi saya lihat satu orang di Jawa itu sampai Rp5 juta. Nah, kalau di Papua Rp12 juta," jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX (Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes) ini. . . tf/mh



Memang dana transfer daerahnya turun, tetapi kementerian dan lembaga akan menggelontorkan program yang sasarannya langsung yang punya masyarakat di daerah

Abdul Fikri Faqih
Anggota Banggar DPR RI

UU Haji Layanan Jemaah Akan Lebih Terintegrasi

Pada Rapat Paripurna ke-4 Agustus lalu menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Layanan haji diharapkan kian paripurna dan terintegrasi.



FOTO: ARIEF/VEL

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa pengajuan RUU ini merupakan usul inisiatif

Komisi VIII DPR RI sebagai respons atas kebutuhan peningkatan pelayanan jemaah, penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan kebijakan Arab Saudi, serta

kebutuhan hukum setelah Presiden RI menetapkan pembentukan badan penyelenggara khusus.

"Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah bersepakat kelembagaan penyelenggara berbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini akan menjadi one stop service, mengkoordinasikan seluruh urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, baik terkait infrastruktur, SDM, maupun pelayanan jemaah," ungkap Marwan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan konstruksi UU ini terdiri atas 16 bab dengan 130 pasal, mengatur mulai dari ketentuan umum, jemaah haji, biaya penyelenggaraan, kelompok bimbingan, penyelenggaraan haji reguler maupun khusus, umrah, koordinasi, kelembagaan, pendidikan, keadaan darurat, hingga ketentuan pidana, dan peralihan.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, disahkannya UU ini, membawa konsekuensi penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk pembentukan kementerian baru. Dasco menegaskan, DPR hanya menjalankan fungsi legislasi dengan menyelesaikan revisi UU, sementara implementasi lebih lanjut berada di ranah eksekutif. Menurutnya, keputusan terkait penambahan maupun penggabungan kementerian sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan, kelembagaan Badan Pengelola Haji (BP Haji) telah resmi menjadi

“

Dengan status kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan kepada jemaah insyaallah bisa lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel

Ansory Siregar
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

Kementerian Haji dan Umrah, sebagaimana disampaikan dalam Pandangan Akhir Presiden atas RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ansory menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan capaian penting dalam upaya negara memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan umrah



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Indonesia.

"Kami menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Selama ini banyak persoalan yang kita hadapi

terkait kuota, pembinaan jemaah, hingga perlindungan jemaah non-kuota. Dengan status kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan kepada jemaah insyaallah bisa lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel," ujar politisi Fraksi PKS itu.

Ansory menambahkan, pembentukan kementerian ini diharapkan tidak sekadar perubahan nomenklatur, tetapi benar-benar menghadirkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang menyeluruh. Ansory menegaskan akan terus mengawal implementasi undang-undang baru ini agar benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah haji Indonesia.

"Kami berharap Kementerian Haji dan Umrah nantinya mampu memperkuat sistem informasi, memanfaatkan kuota tambahan secara optimal, hingga memastikan jemaah kita berangkat dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat. Intinya, ini soal perlindungan hak asasi umat Islam untuk beribadah," tegasnya.  [we/mh](#)



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar.



Pimpinan DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa usai menerima perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
FOTO : RUNI/ANDRI



Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra Dr. H. Cucun A. Syamsurijal, M.A.P. melakukan tugas fungsi pengawasan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (9/9/2025). FOTO : TONDA/ANDRI





Wakil Ketua DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, Cucun Ahmad Syamsurijal saat meninjau salah satu dapur MBG di Kabupaten Bandung, Senin (15/9/2025).
FOTO : TONDA/ANDRI



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno saat Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (RUU Penyiaran) menggelar RDPU bersama dengan Persada ID dan JRKI di Ruang Rapat Komisi I, Gedung DPR, Senin (22/9/2025).
FOTO: OJI/ANDRI





Ketua Komisi III DPR RI Habiburrahman saat memimpin rapat pengambilan keputusan hasil *fit and proper test* calon hakim agung dan calon hakim ad hoc MA di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Parlemen, Selasa (16/9/2025). FOTO : DEVI/ANDRI



Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI telah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan di ruang rapat Komisi VII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). FOTO : FARHAN/ANDRI



Komisi XIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan Tingkat I pembahasan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia mengenai Ekstradisi di Komplek DPR, Senayan, Senin (22/9/2025). FOTO : RUNI/ANDRI



Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Muhammad Jusuf Kalla di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025). FOTO: OPIE/ANDRI



Pansus DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum dan HAM terkait Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9/2025). FOTO: JAKA/ANDRI



Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan APOB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/9/2025). FOTO: JAKA/ANDRI



Muhamad Nur Purnamasidi

Berpolitik dengan Idealisme

Bekasi, Jawa Barat, awal 1970-an. Kota ini merupakan kawasan urban dari berbagai etnis. Penduduk lokalnya mayoritas Betawi. Sebagai penyangga ibu kota, Bekasi banyak dihuni para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Sunda, Jawa, Batak, Madura, berpadu menciptakan populasi yang heterogen.

Syahdan, di sebuah kampung bernama Pondok Ungu, Kecamatan Medansatria, Bekasi, sepasang insan sedang menanti kelahiran anak pertamanya. Hari itu, seorang ibu bersahaja kelelahan setelah menjalani persalinan di sebuah rumah sakit, dekat rumahnya. Tangis bayi seketika memecah ketegangan. Tahmid tiada henti terucap dari bibir sang ibu. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 3 September 1971.

Bayi laki-laki menggemaskan telah lahir. Kedua orangtuanya memberi nama Muhamad Nur Purnamasidi. Saat lahir, beratnya tak sampai 2 kg, kecil sekali. Sepasang insan sangat berbahagia menyambut anak pertamanya ini. Adalah Wandu, ayah sang bayi yang bekerja sebagai PNS di kantor pekerjaan umum setempat. Sementara Nur'aini



ibundanya, adalah pedagang kelontong yang menjual kebutuhan pokok rumah tangga di depan rumahnya.

Purnomo kecil hidup di tengah keluarga religius. Di kampungnya, tinggal pula kakek dan neneknya. Setelah kelahiran Purnomo, masih ada tiga adiknya yang lahir kemudian. Jadi, ia adalah sulung dari empat bersaudara. Saat kecil ia biasa disapa Didi oleh keluarga dan teman-temannya. Masa kecil dihabiskan di Bekasi. Ia suka sekali bermain dengan sahabat-sahabat kecilnya di kampung.

Permainan favoritnya adalah layangan. Bermain layangan biasanya di pinggir sungai dekat rumahnya. Selepas main layangan, siang itu juga dia suka mandi di sungai bersama teman-teman kecilnya. Sampai di rumah, Purnomo kerap dimarahi ibunya, karena kulitnya jadi terlihat gelap dan kotor. Bermain bola adalah kesukaan lainnya. Di kampungnya masih banyak tanah lapang yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain.

Bila bermain bola, ia biasanya jadi pemain tengah. Ia jadi pengoper bola yang handal. Sebagai pemain tengah, ia lebih banyak berpikir daripada bermain bola. Tidak banyak bergerak. Senangnya bila mengingat masa kecil di kampung dulu. Sementara itu, pendidikan formalnya dimulai saat bersekolah di SDN Pondok Ungu, Bekasi. Sekolahnya dekat sekali dari rumah. Setiap hari ia biasa berjalan kaki ke sekolah.

Pelajaran yang disukanya adalah Bahasa Indonesia. Ia menyukai pelajaran ini sejak kecil. Nilainya pun selalu tinggi. Bahkan, sampai kuliah pun, ia selalu mendapat nilai A+. Kecintaannya pada Bahasa Indonesia, membuat Purnomo jadi suka membaca. Perpustakaan sekolah selalu dikunjungi untuk menelusuri buku-buku menarik yang bisa ia baca. Jadi, kalau mau mencari Purnomo, selain di kelas, ya di perpustakaan.



Purnomo teringat kenangan yang tak mengenakan semasa di SD dulu. Ia merasa diremehkan gurunya. "Kamu itu enggak bisa apa-apa," celetuk sang guru kepadanya. Kata-kata itu ia ingat terus, seperti tamparan yang merendahkan dirinya. Dalam hati, Purnomo pun berbisik, "Akan saya tunjukkan nanti. Saya bisa lebih dari apa yang guru katakan." Komitmen di hati itulah yang kelak akan mengubah perjalanan hidup Purnomo kecil.

Memasuki masa SMP, ia bersekolah di SMPN 3 Bekasi. Ia mulai aktif berorganisasi, seperti OSIS, Pramuka, dan kegiatan keagamaan. Dengan berorganisasi, membuat Purnomo jadi lancar berbicara dan berkomunikasi. Sebelumnya, ia dikenal gagap bicara (speech delay). Setiap hari ia bersepeda untuk sampai ke sekolah. Di SMP ini, ia suka dengan pelajaran Bahasa Inggris, lantaran gurunya sangat baik. Bisa mengajarkan bahasa asing dengan cara yang mudah dipahami dan menyenangkan.

Setamat SMP, Purnomo lalu melanjutkan studi di SMAN Tambun, masih di Bekasi. Kali ini ia naik bus ke sekolah, pulang pergi. Di SMA ini, Purnomo aktif masuk Paskibra sampai berpeluang masuk tim

Paskibra tingkat nasional. Sayang, ketika tinggal selangkah lagi masuk seleksi nasional di Cibubur, ia jatuh sakit, terkena cacar air. Namun, setahun kemudian ia tetap bisa ke Istana Negara dalam acara yang berbeda. Saat itu, ada acara ulang tahun Pramuka dan Purnomo masuk menjadi peserta baris berbaris di depan istana.

Di masa SMA, ada kenangan menarik yang dikenang Purnomo. Tersebut seorang guru biologi bernama Pak Mulyadi. Ia guru yang keras penuh disiplin. Menghadapi murid-murid yang nakal, susah diatur, dia kerap menampar. Sang guru ingin melihat anak-anak didiknya tertib dan penuh disiplin. Suatu hari Purnomo berkesempatan bertanya pada sang guru itu. "Kenapa Bapak suka pukul?" Dijawab sang guru, "Kalau kamu sekarang enggak disiplin, enggak jadi apa-apa kamu nanti."

Jawaban Pak Mulyadi itu diingat terus oleh Purnomo dan ia menyadari bahwa disiplin adalah kunci keberhasilan untuk meraih masa depan yang gemilang. Anehnya, walau Pak Mulyadi guru yang keras, tapi ia disayangi banyak murid di SMA tersebut. Pak Mulyadi mudah cair dan berbaur dengan murid-muridnya. Walau keras, ia bisa segera



Selalu berada di tengah masyarakat memberikan bantuan dan perhatian



Menyerahkan pandangan fraksinya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR RI

merangkul, sehingga murid-muridnya tak merasa dijauhi dan dibenci. Bahkan, bisa jadi teman diskusi.

Panggung Politik

Tamat SMA tahun 1990, pemuda Purnomo mulai memikirkan masa depan kuliahnya. Sang ayah menginginkan ia menjadi sarjana pertanian. Tapi, ia tak suka. Diam-diam Purnomo mengumpulkan uang jajannya untuk membeli formulir pendaftaran di perguruan tinggi negeri yang dahulu bernama Sipenmaru (seleksi penerimaan mahasiswa baru). Ia mengikuti Sipenmaru tanpa diketahui orangtuanya. Tak disangka, Purnomo lulus Sipenmaru.

Ia lalu membawa koran yang memuat namanya dalam pengumuman Sipenmaru kepada ayahnya. Kampus pilihannya Universitas Jember, Jawa Timur. Jurusan yang diambil Ilmu Kesejahteraan Sosial, jurusan langka yang tak banyak disukai calon mahasiswa. Purnomo sendiri ternyata belum tahu sama sekali di mana Jember. Akhirnya, diantar ayah naik bus menuju Jember dengan berbekal atlas yang dibelinya sebagai petunjuk jalan.

Hari-hari pertama tinggal di Jember, ia merasa terkendala bahasa dan cuaca. Di Jember, terasa panas

kering. Beda dengan Bekasi yang panas lembab. Bahasa jadi kendala lainnya. Mayoritas masyarakat Jember berbahasa Jawa dan Madura. Secara geografis, Jember berada di Pantura, tapi secara sosiologis, Jember merupakan penghasil kopi, coklat, dan tembakau nasional. Seiring berjalan waktu, Purnomo bisa mengatasi dua kendala utama hidup di Jember.

Ilmu kesejahteraan sosial yang dipilihnya sebetulnya belum diketahui. Namun, karena dengan sadar ia telah memilih jurusan ini, Purnomo pun giat mendalami ilmu ini. Ilmu kesejahteraan sosial merupakan sosiologi terapan. Ada dua dosen sosiologi yang disukainya di kampus. Satu dosen mengajarnya bagaimana berpikir sistematis dan yang lainnya mengajari satu pemikiran bisa menjadi banyak pemikiran. Inilah yang disukai seorang Pur, begitu kini ia akrab disapa.

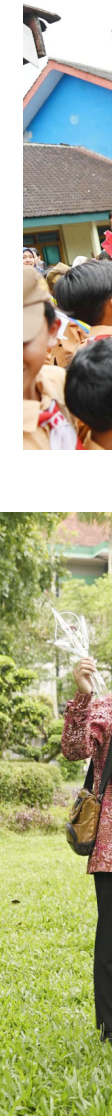
Kapasitas intelektual Pur kian terasah. Sebagai aktivis kampus, ia juga bergaul dengan banyak kalangan. Ia pernah menjabat wakil ketua di Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), semacam parlemennya kampus. Di luar kampus, Pur adalah aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia). Mendalami studi Islam juga tak ketinggalan selama menjadi mahasiswa di Jember. Jadilah

ia intelektual muda muslim.

Para senior Pur yang satu kampus adalah Taufik Hidayat, mantan anggota DPR RI sebelum Pur masuk ke DPR. Ada lagi T. Taufiqulhadi, mantan jurnalis yang juga mantan anggota DPR RI. Jauh sebelumnya, ada pula Ali Maskur Musa yang juga mantan anggota DPR RI.

Lulus kuliah tahun 1995, Pur langsung diminta dosennya mengajar di sekolah menengah pekerja sosial. Dua tahun jadi guru honorer di sekolah milik dosennya itu, ia digaji Rp30 ribu per bulan. Jebolan pendidikan kesejahteraan sosial sebetulnya diarahkan pada pekerjaan supervisi program sosial agar sesuai harapan, seperti pengentasan kemiskinan, pendampingan Program Keluarga Harapan, dan lain-lain.

Setelah itu, Pur diajak seniornya memberikan pendampingan bagi para pekerja anak perempuan di Jember. Proyek pendampingan ini bekerja sama dengan Asian Foundation. Pur mendampingi anak-anak yang disuruh bekerja oleh orangtuanya. Ia mengajari membaca dan menulis anak-anak itu. Bahan-bahan literasi berupa majalah dan buku cerita juga kerap dibawanya sebagai bahan bacaan. Anak-anak yang belum bisa membaca, ia ceritakan isinya. Pendampingan dilakukan pada saat jam istirahat.





Aksi giat dapil Bang Pur, begitu ia akrab disapa masyarakat setempat



Bahagia bersama keluarga tercinta

Sabtu dan Minggu, Pur rutin mengunjungi pekerja anak-anak itu.

Setelah dua tahun kontraknya habis di Asian Foundation, pemuda Pur hijrah ke Jakarta. Seniornya mengajak bergabung dengan sebuah yayasan untuk menjadi kepala pemasaran majalah Tasawuf bagi kalangan muslim menengah ke atas. Ia berkeliling ke toko-toko buku se-Jabodetabek.

Tak lama di yayasan itu, Pur kemudian mulai berpikir untuk berkiprah di panggung politik. Sementara ayahnya selalu

menyarankan Pur menjadi PNS. Namun, tak pernah lolos seleksi. Apalagi, ia adalah mantan pendemo yang pernah ditahan walau hanya semalam. Keputusannya tertarik pada dunia politik didorong oleh idealismenya sendiri yang ingin terlibat langsung merumuskan berbagai kebijakan publik dengan menjadi wakil rakyat. Akhirnya, ia pilih partai besar seperti Golkar sebagai pilihan pragmatis kendaraan politiknya.

"Saya punya banyak sekali idealisme yang harus saya perjuangkan dan itu hanya bisa ketika masuk di partai yang besar," ungkap Pur. Pada kontestasi Pemilu 2014, ia menjadi kandidat legislator dan terpilih dari Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang). Ia sempat tak yakin bisa mewujudkan harapan konstituennya, ketika sudah duduk sebagai wakil rakyat di DPR RI.

Pertama kali menjadi anggota DPR, ia duduk di Komisi VIII, komisi agama dan sosial yang sangat pas dengan latar pendidikannya. Bersama teman-teman di komisinya, Pur berhasil menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) dari 5 juta menjadi 10 juta KPM.

Selain di Komisi VIII, ia pernah duduk di Komisi XI sampai periode pertamanya berakhir. Pada Pemilu 2019, ia terpilih lagi dari dapil yang sama. Kali ini, duduk di Komisi X yang membidangi pendidikan. Kemudian pada Pemilu 2024 lalu, Pur terpilih untuk kali ketiga sebagai wakil rakyat di Senayan dan tetap berada di Komisi X. Selain di komisi, Pur juga berkiprah di Badan Anggaran DPR RI.

Sudah tiga periode di DPR RI, mantan Ketua PMII ini, terus memperjuangkan idealismenya menyejahterakan rakyat seperti impiannya semasa kuliah dulu. Sebagai legislator, ia tentu telah banyak mengarsiteki produk undang-undang yang menyangkut hidup rakyat Indonesia. Idealisme

menyejahterakan tetap tertanam kuat dalam sanubarinya.

Hobi Mancing

Kesibukannya luar biasa setelah menjadi anggota DPR RI. Keluarga kerap ditinggal berlama-lama di rumah. Namun, ketika ada waktu luang, Pur mengajak keluarganya berwisata ke mana saja, yang penting bisa menjaga kebahagiaan bersama keluarga.

Di rumah, Pur tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Ada Zaim Fiddah, istri tercinta yang dinikahnya tahun 1997. Dari pernikahannya itu dikaruniai empat anak masing-masing Ahmad Munawwir Al Afkar, Mahmoud Ahmadinejad, Noor Ratu Balqis, dan Dewi Saraswati.

Bicara hobi, mantan pengurus Soksi ini sangat suka mancing. Tak tanggung-tanggung, Pur mancing ke tengah laut di Ancol Jakarta atau ke kawasan Kepulauan Seribu. Ia merasa lega bila sudah mendapatkan ikan besar. Ia sering mendapatkan kakap putih atau kakap tompel yang besar-besar. Untuk mendapatkannya, memang, harus ke tengah laut. Sampai kini, ia masih suka mancing.

Bahkan, saat mengunjungi konstituen di dapilnya, ia tak lupa mengajak tim kampanyenya ke tengah laut untuk mancing, selepas giat dapil. Biasanya Pur menyewa perahu untuk mengajak timnya menyalurkan hobi memancingnya itu. Tak hanya ke laut, ia juga kerap mengajak ke kolam-kolam pemancingan. Hasil pancingannya bisa dinikmati bersama-sama.

Memancing bagi penikmat ikan asin ini, bisa menenangkan pikiran sekaligus melatih kesabaran. Dengan memancing ke tengah laut, ia melepas kepenatan dari hiruk pikuk politik. Di tengah laut tak ada yang bisa menghubunginya, karena memang tak ada sinyal. Jadi, ia bisa menikmati sepenuhnya hobi mancing. 

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto beserta rombongan disambut hangat oleh Komandan Sesko TNI, Marsdya TNI

Arif Widiyanto. Utut mengapresiasi kemampuan Sesko TNI dalam beradaptasi, terutama terkait perubahan durasi pendidikan dari 10 bulan menjadi 4 bulan tanpa mengurangi kualitas lulusan, meskipun dengan anggaran terbatas.

"Kami mengapresiasi teman-teman Sesko yang cepat beradaptasi. Kemampuan siswanya tetap baik dan terukur dengan anggaran yang tidak besar," ujar Utut usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Sesko TNI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9/2025) silam. Marsdya Arif Widiyanto menyambut baik dukungan Komisi I, yang dinilainya sebagai mitra strategis untuk memajukan pendidikan militer.

Menguatkan Kembali Pendidikan Militer

Komisi I DPR RI melakukan dua kunjungan kerja terpisah yang berfokus pada penguatan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kunjungan pertama dilakukan ke Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI di Bandung. Sementara kunjungan kedua menyasar Brigade Kavaleri I di Tangerang Selatan.

la berkomitmen melahirkan perwira-perwira yang mampu beradaptasi dengan lingkungan

strategis, perkembangan teknologi, dan politik.

Utut menambahkan, Komisi I akan



FOTO: TARI/VEL

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto (◉) saat memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Sesko TNI di Bandung, Jawa Barat, Kamis (11/9/2025).



FOTO: BALGYS/VEL

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Brigade Kavaleri I/Tank Limpung Alugoro di Tangerang Selatan, Kamis (11/9/2025).

menampung aspirasi penambahan kurikulum terkait siber dan kecerdasan buatan (AI). Hal ini akan dibahas dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, dengan tujuan memperkuat Sesko TNI sebagai center of excellence atau pusat keunggulan.

"Intinya kami ingin memperkuat Sesko TNI karena ini adalah sekolah yang menjadi tempat lahir pemimpin TNI masa depan. Kami tidak akan memberikan janji yang tidak pasti, tetapi yang penting kami akan mendukung supaya Sesko TNI menjadi center of excellence atau pusat keunggulan TNI," tegas Utut.

Kunjungi Markas Kavaleri I

Pada saat yang hampir bersamaan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, melakukan kunjungan ke Markas Brigade Kavaleri I/Tank Limpung Alugoro

di Tangerang Selatan. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan satuan dalam tugas pengamanan, terutama setelah Brigade Kavaleri I diperbantukan dalam mengamankan ibu kota saat terjadi unjuk rasa yang berujung kerusuhan.

"Kami dari Komisi I memberikan dukungan penuh kepada rekan-rekan yang bertugas di lapangan. Dengan



Komisi I ingin memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung lainnya.

Sukamta
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

peralatan yang seadanya, mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan baik, benar, dan presisi," kata Sukamta usai melakukan kunjungan kerja ke Markas Brigade Kavaleri I/Tank Limpung Alugoro di Tangerang Selatan, Kamis (11/9/2025) lalu.

Sukamta menjelaskan, Brigade Kavaleri I memiliki tugas utama sebagai pasukan tempur, namun juga dapat diperbantukan untuk operasi selain perang. Oleh karena itu, Komisi I ingin memastikan kesiapan personel, peralatan, dan sarana pendukung lainnya. Ia berharap situasi di Ibu Kota kembali tenang agar seluruh elemen bangsa dapat kembali fokus membangun negara.

"Mudah-mudahan Indonesia kembali tenang, ibu kota tenang, dan kita bersama rakyat bisa membangun negara ini untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Semoga demokrasi juga berjalan dengan semakin baik kualitasnya," pungkasnya.  mri.gys/mh

RUU BUMD dan Penguatan Fiskal Daerah

Komisi II DPR RI melakukan serangkaian kunjungan kerja spesifik ke tiga kota berbeda, Kendari, Kupang, dan Makassar. Kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi daerah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang akan segera dibahas. Seluruh anggota Komisi II sepakat bahwa penguatan BUMD melalui transformasi dan tata kelola yang lebih baik adalah kunci untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.



Ketua Komisi II DPR RI Rifqinazmy Karsayuda saat memimpin kunspek Komisi II di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Di Kendari, Ketua Komisi II Rifqinazmy Karsayuda menegaskan komitmennya memperkuat peran BUMD sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah. "Pada

kesempatan hari ini, selain pengawasan, kami juga ingin menyerap berbagai macam informasi dan aspirasi. Insyaallah dalam waktu dekat kami bersama Kementerian Dalam Negeri akan membahas RUU BUMD yang merupakan undang-undang inisiatif pemerintah, inisiatif

dari Kementerian Dalam Negeri yang akan dibahas di Komisi II DPR RI," ujar Rifqi di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (27/8/2025).

Inisiatif RUU BUMD merupakan hasil dari rangkaian rapat kerja antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri. "Kami ingin menghadirkan kemandirian fiskal di daerah," paparnya. Menurutnya, kemandirian fiskal bisa tercapai jika daerah mampu menciptakan sumber pembiayaan kreatif di luar APBN dan APBD. "Salah satunya BUMD harus sehat." BUMD yang sehat akan menghasilkan laba atau dividen yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sementara itu, di Kupang, NTT, Anggota Komisi II Muhammad Khozin menyoroti pentingnya transformasi BUMD, baik dari sisi tata kelola maupun pelayanan. Ia menjelaskan, BUMD memiliki dua skema, yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang memiliki fungsi pelayanan dan fungsi menghasilkan, serta Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang hanya fokus pada fungsi menghasilkan.

Khozin menekankan, agar mampu bersaing dengan perbankan swasta maupun BUMN, BUMD harus mengubah orientasi prosesnya dan

memberikan pelayanan maksimal yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tanpa transformasi tersebut, ia menilai BUMD sulit berkembang dan hanya akan bergantung pada privilese yang diberikan pemerintah.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah transformasi nyata, terutama dalam pelayanan," ujarnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR yang berlangsung di Kupang, Sabtu (27/8/2025). Menurutnya, tanpa transformasi, BUMD akan sulit berkembang dan hanya bergantung pada fasilitas pemerintah.

Terakhir, di Makassar, Anggota Komisi II Taufan Pawe menegaskan pentingnya pengutan fiskal daerah melalui optimalisasi peran BUMD, termasuk perbankan daerah seperti PT Bank Sulselbar. Menurutnya, fiskal daerah saat ini masih sangat lemah, dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap struktur APBD yang rata-rata di bawah 20 persen, bahkan di banyak daerah hanya sekitar 15 persen

"Perkuatan fiskal daerah ini perlu dilakukan melalui kajian bersama pemerintah provinsi dan



Anggota Komisi II Muhammad Khozin saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR di Kupang, Sabtu (27/8/2025).

kabupaten/kota," ujar Taufan di Makassar, Rabu (27/8/2025) lalu. Ia menambahkan, urgensi penguatan BUMD semakin mendesak seiring dengan rencana lahirnya Undang-Undang BUMD yang kini tengah disiapkan pemerintah bersama DPR.

"BUMD ini menjadi salah satu penopang utama fiskal daerah. Karena itu, hadirnya Dirjen BUMD di Kementerian Dalam Negeri

diharapkan mampu memperkuat fasilitasi pemerintah pusat kepada daerah," lanjutnya.

Taufan juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas tata kelola keuangan dan manajemen aset daerah. Ia berharap, BUMD perbankan seperti PT Bank Sulselbar dapat berperan lebih besar sebagai instrumen pendanaan pembangunan daerah. **rr,bif,ssb/mh**



Anggota Komisi II Taufan Pawe saat mengikuti kunjungan kerja spesifik di Makassar, Rabu (27/8/2025).

Mendukung Reformasi Polri



Delegasi Komisi III DPR RI saat menggelar pertemuan di Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (12/9/2025).

FOTO: NADHEN/VEL

Komisi III DPR RI mendukung rencana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan reformasi Polri. Ini penting untuk membawa lembaga penegak hukum ini menjadi lebih baik lagi. Untuk itu, perlu dicari orang-orang yang berintegritas tinggi yang bisa masuk ke dalam tim reformasi Polri.

Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto, melihat, langkah mereformasi Polri mampu membawa Polri menjadi lembaga yang kredibel dan berintegritas tinggi. "Kalau memang presiden menghendaki demikian (reformasi), agar dilaksanakan. Apa isinya nanti tentu ada koordinasi ya. Tim yang dibentuk itu siapa, terdiri dari apa saja, yang mau direformasi itu apa, nanti dibahas kemudian," katanya di Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (12/9/2025) lalu.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan bahwa reformasi kepolisian sebenarnya sudah berjalan. Namun, akan lebih baik jika di dalam tubuh Polri dilakukan reformasi kultural. "Reformasi kepolisian Indonesia sebenarnya terus bergerak. Reformasi struktural, reformasi instrumental, dan juga reformasi kultural. Tapi memang, yang masih menjadi pekerjaan rumah Polri adalah reformasi kultural," ujarnya.

Reformasi kultural bukanlah hal yang mudah. Maka, perlu dukungan

presiden untuk bisa melakukannya. Nasir pun berharap agar presiden bisa mewujudkan reformasi struktural di kepolisian. "Reformasi kultural ini yang diharapkan bisa membentuk kepribadian polisi yang antisuap. Kemudian dia melayani masyarakat dengan sepenuh hati, punya jiwa pengabdian dan kemanusiaan, sehingga polisi benar-benar untuk masyarakat," pungkasnya.

RUU Perampasan Aset

Sementara di Jambi, Komisi III DPR membincang serius realisasi



FOTO: RIDWAN/VEL

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, saat Kunjungan Kerja Spesifik di Kota Jambi, Jumat (12/9/2025).

pengesahan RUU Perampasan Aset. Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan, menegaskan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus berjalan seiring dengan pembahasan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Itu penting, karena KUHP akan menjadi landasan hukum acara bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan aturan perampasan aset.

"RUU Perampasan Aset sudah diminta oleh masyarakat, direspons oleh presiden, bahkan diserahkan ke DPR. DPR tentu meresponsnya dengan cepat. Tetapi RUU Perampasan Aset ini harus berjalan paralel dengan RUU KUHP," ujar Hinca kepada Parlementaria di Kota Jambi, Jambi, Jumat (12/9/2025) lalu.

Ia menekankan bahwa keseimbangan antara substansi

RUU Perampasan Aset dan kesiapan aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Tanpa payung hukum acara yang jelas, menurutnya, pelaksanaan perampasan aset bisa berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

"Power yang tidak dikontrol cenderung disalahgunakan. Agar tidak terjadi abuse of power, maka pengaturannya harus tepat di KUHP. KUHP-lah yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak, ketika aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya," jelas politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa substansi RUU Perampasan Aset sebenarnya telah tersebar di berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Kejaksaan, dan sejumlah regulasi lainnya. "Pasal-pasal yang sudah ada itu nanti dirunut, disusun kembali, dan dijadikan satu dalam UU Perampasan Aset, bersama dengan KUHP yang mengatur aparat penegaknya," imbuhnya. — **nda,rdn/mh**



FOTO: NADHEN/VEL

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil (✓) dalam foto bersama usai pertemuan di Mapolda Sulawesi Selatan, Jumat (12/9/2025).

Penguatan Ketahanan Pangan dan Konservasi

Komisi IV DPR RI berkomitmen penuh mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup melalui berbagai kebijakan strategis. Komitmen ini terlihat dari tiga kunjungan kerja yang dilakukan di lokasi berbeda, yaitu Maros, Bontang, dan Bali, dengan fokus pada penguatan ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kunjungan ke Maros, Sulawesi Selatan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi menegaskan peran strategis Maros sebagai sentra

produksi beras nasional. Dengan produktivitas mencapai 9 ton per hektare dan panen hingga tiga kali setahun, wilayah ini menjadi salah satu pilar ketahanan pangan Indonesia. Untuk menjaga dan

meningkatkan capaian tersebut, Komisi IV mencatat berbagai kebutuhan petani, mulai dari alat pertanian seperti combine harvester, traktor roda empat, dan pompa, hingga sumur dalam.

"Ini harus kita jaga dan tingkatkan. Semua kebutuhan petani sudah kami catat. Insyaallah traktor akan sampai minggu depan," ujarnya dalam kunjungan kerja panen raya di Kabupaten Maros, Selasa (12/8/2025) lalu. Disampaikan Titiek, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani menjadi kunci untuk menghadapi tantangan seperti cuaca, ketersediaan sarana produksi dan infrastruktur irigasi.

"Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Mari gunakan momentum



Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Haryadi saat panen raya di Kabupaten Maros, Selasa (12/8/2025).

FOTO: TAUJAN/VEL

panen raya ini sebagai titik tolak menuju produksi padi yang semakin meningkat, petani semakin sejahtera, dan kemandirian beras yang berkelanjutan,” kata Titiek lagi.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi mengapresiasi dukungan ini, menyebutkan bahwa surplus beras di Maros dan Sulsel adalah bukti kolaborasi yang solid. Hingga Juli 2025, produksi beras di Maros mencapai 64.838 ton, dengan surplus 38.033 ton yang berkontribusi signifikan pada ketahanan pangan nasional.

Sementara di Bontang, Kalimantan Timur, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyoroti pentingnya pengelolaan kawasan konservasi mangrove yang terpadu dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Ia menjadikan Bontang Mangrove Park sebagai contoh keberhasilan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung pesisir dan penyerap karbon, tetapi juga menjadi destinasi ekowisata yang menggerakkan ekonomi lokal.

“Bontang Mangrove Park adalah contoh nyata keberhasilan sinergi. Kawasan ini tidak hanya melindungi pesisir, tetapi juga mengembangkan ekowisata dan menggerakkan ekonomi lokal,” jelas Panggah pada



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto saat menanam mangrove di Bontang, Kaltim, Senin (11/8/2025).

Kunjungan Kerja Reses ke Bontang Mangrove Park, Bontang, Kaltim, Senin (11/8/2025) silam. Kawasan yang dulunya terdegradasi ini kini telah menjadi pusat edukasi lingkungan dan penelitian, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa konservasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan beriringan. Ke depan, Panggah mendorong penguatan kelembagaan pengelola dan peningkatan alokasi anggaran agar model seperti ini dapat direplikasi di wilayah lain.

Sementara itu, di Denpasar, Bali, Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari menyatakan dukungan penuh terhadap program Pulau Organik yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, inisiatif ini sejalan dengan agenda nasional untuk membangun sistem pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Kami (Komisi IV DPR) tentu sangat mendukung langkah ini. Pertanian organik bukan hanya menjawab tantangan ketahanan pangan, tetapi juga sejalan dengan pelestarian lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal,” tutur Endang saat mengikuti kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Senin (4/8/2025) lalu.

Komisi IV berkomitmen mengawal program ini dengan mendorong subsidi bagi petani, pengembangan irigasi, dan penguatan jaringan pemasaran, termasuk fasilitasi ekspor produk organik. Gubernur Bali I Wayan Koster menyambut baik dukungan ini, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat transformasi pertanian di Bali menuju sistem yang lebih hijau, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. [tn,ica,cas/mh](#)



Anggota Komisi IV DPR RI Endang Setyawati Thohari saat mengikuti kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Senin (4/8/2025).

Infrastruktur Penyedia Air Bersih Harus Diperhatikan



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan (✓) bersama Anggota Komisi V lainnya, saat meninjau pembangunan proyek Bendungan Jatiluhur 1 di Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).

Akses air bersih bagi masyarakat masih memerlukan perhatian serius pemerintah. Waduk-waduk yang sudah terbangun perlu dipantau kembali kapasitas dan alirannya bagi irigasi pertanian maupun air bersih bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan, menyoroti persoalan penyediaan air bersih di Indonesia yang dinilainya masih belum

merata. Meski proyek Bendungan Jatiluhur 1 di Jawa Barat dinilai sudah cukup maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Jabodetabek, namun ia menegaskan bahwa daerah lain juga perlu mendapat perhatian serius.

"Bukan hanya Bekasi dan Jakarta, di seluruh kota di Indonesia ini kita memiliki persoalan air bersih. Bahkan, ada kabupaten-kabupaten tertentu yang penyediaan air bersihnya belum bisa dipenuhi," ungkap Andi

Iwan saat diwawancarai di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/09/2025) lalu.

Ia menekankan, pemerintah harus memastikan keadilan akses air bersih di seluruh Indonesia. "Untuk Bekasi, Jakarta, maupun daerah-daerah sekitarnya memang sudah cukup maksimal. Namun, kita harapkan seluruh penduduk di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih kesulitan, juga bisa segera terpenuhi kebutuhan air bersihnya," jelasnya. Menurutnya, pemerataan infrastruktur air bersih harus menjadi prioritas pemerintah, seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan dasar masyarakat.

“

kita harapkan seluruh penduduk di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang masih kesulitan, juga bisa segera terpenuhi kebutuhan air bersihnya.

Andi Iwan Darmawan
Wakil Ketua Komisi V DPR RI

Sementara menurut Anggota Komisi V DPR RI Sudjarmiko, Komisi V memberikan dukungan penuh terhadap keberadaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jatiluhur Regional, yang dinilai berhasil menjadi solusi penyediaan air bersih lintas daerah. SPAM ini memasok kebutuhan air bersih untuk wilayah Jakarta, Kota



Anggota Komisi V DPR RI Sudjarmiko saat mengikuti kunjungan kerja di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (17/9/2025).

FOTO: AARON/VEL

Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Karawang, dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), sehingga tidak sepenuhnya bergantung pada APBN.

"Jadi, SPAM Jatiluhur regional ini bagus, karena dari satu tempat bisa menyuplai beberapa kota dan kabupaten. Sistemnya juga baik, karena tidak semuanya menggunakan APBN, tapi ada sistem KPBU. Ini salah satu cara untuk mengurangi kekurangan pasokan air di Bekasi, Jakarta, dan Karawang," jelasnya kepada Parlemen Rabu (17/09/2025) lalu.

Sudjarmiko mengungkapkan, meskipun sempat terkendala pandemi Covid-19, serapan air bersih justru melampaui ekspektasi. "Ketika dibuka Desember 2024, serapannya langsung naik hingga 300 persen. Itu artinya masyarakat sangat

membutuhkan, apalagi tarifnya juga terjangkau, sekitar Rp2.800 per meter kubik," ujarnya.

Legislator Fraksi PKB itu juga menambahkan, distribusi air bersih nantinya akan dilakukan oleh pemerintah daerah melalui PDAM setempat. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap air bersih akan semakin luas dan merata.

Komisi V DPR RI, kata Sudjarmiko, siap mendorong model SPAM Jatiluhur ini diperluas ke daerah-daerah lain di Indonesia. "Komisi V sangat mendukung model SPAM regional ini. Untuk kebutuhan di Kota Bekasi maupun DKI Jakarta sudah cukup, dan mudah-mudahan dengan pertumbuhan penduduk yang terus naik, ketersediaan air tetap mencukupi. Ini bisa menjadi percontohan di tempat-tempat lain nantinya," pungkasnya. — aar/mh



Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini saat menerima cenderamata pada kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PT Pusri, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/9/2025).

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mengatakan, sejumlah langkah progresif telah dilakukan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang dalam menudukung langkah tata kelola pupuk subsidi. Hal itu ia sampaikan pada kunjungan kerja Komisi VI DPR RI ke PT Pusri, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (17/9/2025) silam.

Ia menjelaskan, transformasi digital yang dijalankan Pupuk Indonesia, termasuk Pusri, mampu mengefisienkan biaya hingga triliunan rupiah. Adapun skema baru pupuk subsidi yang tengah disimulasikan—dengan mengubah pola cost plus menjadi market to market—dinilainya dapat menjadi

Transformasi Digital Tata Kelola Pupuk

Transformasi digital sudah menjadi tren yang harus dilakukan untuk menata kembali distribusi pupuk nasional. Ini juga sekaligus untuk pembenahan tata kelola pupuk subsidi dan revitalisasi pabrik pupuk tua untuk keberlanjutan industri pupuk.

solusi agar subsidi lebih tepat sasaran. Dengan begitu, petani tetap mendapat kepastian, sementara perusahaan tetap sehat secara bisnis.

"Dengan kata lain skema ini bisa lebih efisien, mendorong Pupuk Indonesia bekerja lebih baik, sekaligus memastikan pupuk sampai



FOTO: AYU/VEL

ke petani. Tetapi juga ada kepastian korporasi tidak rugi terus. Jangan sampai mereka hanya bergantung pada subsidi negara," tegas Anggia.

Selain itu, politisi Fraksi PKB tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Ia menilai Pusri telah menunjukkan komitmen dalam pemakaian produk dalam negeri pada sejumlah peralatan.

"TKDN penting, harus terus ditingkatkan. Dari hasil peninjauan tadi, Pusri sudah banyak menggunakan komponen dalam negeri, mulai dari kabel listrik hingga berbagai peralatan pendukung lainnya. Ini langkah baik yang perlu diperluas," tambahnya.

Anggia menegaskan, Komisi VI DPR RI akan terus mengawal transformasi Pupuk Indonesia agar selaras dengan kepentingan nasional. Menurutnya, tata kelola pupuk harus memberi manfaat ganda, yakni petani mendapatkan haknya atas pupuk subsidi, sementara perusahaan pupuk tetap sehat dan berkembang.

Di Badung, Bali, Komisi VI menyoroti soal keberadaan BUMN. Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, menegaskan,

keberadaan BUMN harus dijalankan secara profesional, dengan tujuan menghasilkan laba serta memberikan dividen kepada negara. Namun, ia menilai prinsip tersebut belum tercermin sepenuhnya dalam pengelolaan dana pensiun oleh PT Taspen dan Asabri.

Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (17/9/2025) lalu, Herman menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi kedua BUMN tersebut adalah ketidakseimbangan antara premi yang dikelola dengan klaim yang harus dibayarkan setiap tahun.

Parlementaria.

Menurut Herman, perhitungan keuangan menunjukkan kelemahan sistem, terutama di Taspen yang menghadapi selisih besar antara premi Rp7 triliun dan klaim tahunan Rp14 triliun. Kondisi tersebut, kata dia, sulit diatasi hanya dengan manajemen keuangan atau bisnis finansial biasa.

"Tetapi kalau melihat Taspen, nilai premi-nya hanya Rp7 triliun, tetapi nilai klaim tahunannya Rp14 triliun. Tidak mungkin untuk mengejar setinggi itu dari pengelolaan sistem manajemen keuangan ataupun bisnis finansial di Taspen untuk memenuhi



FOTO: SAFITRI/VEL

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Rabu (17/9/2025).

"Ini kan sebetulnya dalam rangka membentuk atau menjadikan BUMN lebih profesional. Karena badan usaha milik negara ini harus menghasilkan laba, memberikan deviden kepada negara untuk memperkuat fiskal negara. Nah, konteks ini tidak terjadi dalam skema-skema tunjangan hari tua, baik di TASPEN maupun di ASABRI," ujarnya kepada

terhadap jumlah itu," jelas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu.

Ia menekankan, solusi tidak bisa serta-merta menaikkan premi, karena hal itu berpotensi menambah beban negara maupun peserta jaminan hari tua. Sebaliknya, diperlukan strategi investasi jangka pendek yang lebih efisien agar bisa memenuhi kewajiban tahunan klaim. — ayu, srw/mh

Mendukung Transformasi RRI Lewat RUU RTRI

Komisi VII DPR RI menegaskan komitmennya mendorong transformasi Radio Republik Indonesia (RRI) agar semakin relevan di era digital. Upaya ini diwujudkan melalui dorongan terhadap percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang Radio Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) agar masuk dalam prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.



FOTO: RIZKI/VEL

Foto bersama Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga (✓) saat kunjungan kerja ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/9/2025).

“Harapannya pada 2026 bisa naik ke prioritas, lalu dibahas lebih lanjut di Komisi VII,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, saat kunjungan kerja ke Kantor RRI Palembang, Jumat (12/9/2025) silam. RUU RTRI tidak hanya menjadi payung hukum bagi penguatan RRI, tetapi juga membuka jalan penggabungan antara RRI dan TVRI dalam satu sistem penyiaran publik negara. Hal ini dinilai penting agar lembaga penyiaran publik mampu bersaing secara lebih adil dengan media swasta.



FOTO: ENO/WEL

Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi VII DPR RI, Putra Nababan (✓), bersama tim saat mengunjungi studio RRI Pontianak, Jumat (12/9/2025).

“Ketergantungan terhadap APBN ini akan diatur dalam RUU RTRI, dengan membuka ruang komersial lebih luas, namun tetap menjaga independensi lembaga penyiaran publik,” jelas Lamhot. Saat ini, RUU RTRI masih dalam daftar Prolegnas dan dirancang sebagai tindak lanjut revisi UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang tengah dibahas di Komisi I DPR RI.

Sementara di Pontianak, Kalimantan Barat, Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI Putra Nababan, mengingatkan pentingnya peran RRI sebagai jembatan antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Kunjungan ke RRI Pontianak menjadi momentum untuk menegaskan bahwa RRI tidak boleh hanya menjadi penyampai berita formal, melainkan juga corong aspirasi rakyat.

“RRI, TVRI, dan Antara bisa menyerap aspirasi dari guru, pelajar,

mahasiswa, ibu-ibu, asosiasi industri, hingga wartawan. Semua harus disuarakan,” ujar Putra dalam dialog bersama jajaran RRI Pontianak, Kalbar, Jumat (12/9/2025) silam.

Menurutnya, kehadiran media penyiaran publik harus dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan yang memiliki keterbatasan akses informasi. Aspirasi yang terekam lewat siaran RRI akan sangat membantu pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. “RRI harus hadir sebagai media publik yang menyatukan bangsa,” tegas Putra.

Dengan dukungan penuh dari Komisi VII DPR RI, transformasi RRI diharapkan tidak hanya menjawab tantangan digitalisasi dan ketergantungan anggaran, tetapi juga memperkuat peran media penyiaran publik sebagai pilar demokrasi dan pembangunan bangsa.  eno,rr/mh



FOTO: ENO/VEL

Anggota Komisi VIII, Alimudin Kolatlena, saat menjenguk beberapa siswa yang sedang sakit di Layanan kesehatan Sekolah Rakyat Mandiri Pintar (SRMP) 7 Sukabumi.

Meninjau Sekolah Rakyat dan Sosialisasi UU Haji

Layanan kesehatan di Sekolah Rakyat Mandiri Pintar (SRMP) 7 Sukabumi mendapat perhatian khusus. Sekolah Rakyat (SR) juga memberi layanan kesehatan sekaligus bagi para siswa. Selain soal SR, Komisi VIII DPR RI juga menyosialisasikan UU Haji yang baru saja disahkan ke daerah.

Di Sukabumi, Jawa Barat, delegasi Komisi VIII DPR RI meninjau layanan kesehatan bagi siswa SR pada Kamis (18/9/2025) lalu. Anggota Komisi VIII Alimudin

Kolatlena, menyatakan bahwa keberadaan tenaga medis di sekolah tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga kesehatan para siswa.

Komisi VIII sempat menjenguk beberapa siswa yang sedang sakit.

Menurut laporan tenaga medis, kondisi mereka masih tergolong ringan, seperti demam, dan sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. "Hari ini kami lihat langsung. Ada anak-anak yang sakit demam, namun sudah ditangani dan dalam proses pemulihan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Alimudin kepada Parlementaria.

Ia menjelaskan bahwa sekolah rakyat sudah memiliki mekanisme penanganan kesehatan. Jika ada siswa yang mengalami kondisi lebih serius, pihak sekolah siap merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Dengan demikian,

anak-anak tetap merasa aman dan terjamin kesehatannya selama berada di sekolah.

Komisi VIII menilai keberadaan tenaga medis di sekolah sangat krusial, mengingat anak-anak tinggal di asrama dalam jangka waktu lama. Dengan dukungan kesehatan yang memadai, orang tua siswa juga lebih tenang melepas anak mereka untuk menimba ilmu di SR. "Sehat itu bagian dari pendidikan. Anak-anak bisa belajar dengan baik kalau kondisi tubuhnya fit. Maka, layanan kesehatan di sekolah rakyat harus terus diperkuat," tegas Alimudin.

Sementara di Semarang, Jawa Tengah, delegasi Komisi VIII menggelar sosialisasi UU Haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, menyampaikan bahwa sosialisasi ini penting agar pelaksanaan haji ke depan berjalan lebih baik, terlebih setelah terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang akan mengambil alih sebagian fungsi Kemenag.

"Perubahan UU ini sifatnya tidak menyulitkan, harus soft, dan tidak menimbulkan keributan, baik terkait masalah kantor maupun personal

seperti pergeseran antara Kabid dan Kasi dari Kemenag ke Kementerian Haji dan Umrah. Nah, ini yang sudah kami diskusikan dan kami akan tindaklanjuti ke depan yang lebih konkrit lagi setelah keluarnya keputusan presiden (Kepres)," terang Wachid di Semarang, Jateng, Kamis (18/9/2025) lalu.

Legislator F-Gerindra ini juga menyoroti sejumlah persoalan pada penyelenggaraan haji tahun sebelumnya. Catatan yang disampaikan antara lain terkait kebijakan multi syarikah yang kurang tersosialisasi hingga menimbulkan keributan, keterlambatan layanan catering menjelang dan setelah Arafah, pemondokan jemaah yang tersebar di lokasi jauh dan sempit, serta keterlambatan bus yang membuat jemaah harus berjalan kaki dari Arafah, Muzdalifah, hingga Mina.

"Yang pertama ada pada catering yang kemarin menjadi masalah karena ada jemaah yang H-2 sebelum Arafah dan H+2 setelah Arafah itu banyak jemaah haji yang tidak bisa mendapatkan makanan karena ada persoalan masalah

kontrak pihak catering dengan pihak Arab Saudi. Kedua, masalah pemondokan. Pemondokan kemarin tersebar dengan pemondokan yang kecil-kecil dan tempatnya yang terlalu jauh itu menimbulkan satu masalah," ungkap Wachid.

Masalah lain, lanjutnya, kegiatan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina menyisakan masalah transportasi. Bus kerap terlambat. Jadi, banyak jemaah yang tidak bisa naik bus dan akhirnya jalan kaki dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Wachid juga menekankan perlu penyelesaian masalah "haji batu" atau haji dana talangan.

Menurutnya, praktik lama yang memungkinkan jemaah mendaftar dengan setoran awal Rp5 juta tanpa bisa melunasi biaya penuh telah menyebabkan antrian panjang dan tersendatnya penerbitan visa. "Persoalan haji batu ini harus diselesaikan. Kalau masih ada jemaahnya, maka dananya harus dikembalikan. Tapi, kalau sudah tidak jelas, harus diputuskan uang itu milik siapa. Ini yang akan kami bahas bersama Kementerian Haji dan Umrah," tegasnya. — eno,mfn/mh



Foto bersama Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid (◀), saat kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (18/9/2025).



Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani, saat meninjau dapur MBG di Denpasar, Bali, Jumat (19/9/2025).

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani, mengingatkan agar pembangunan dapur MBG segera dipercepat. "Kalau kita lihat dari target 300-an, yang berjalan baru sekitar 60-an. Padahal, sekarang sudah bulan September. Artinya, kita hanya punya waktu tersisa Oktober dan November. Biasanya Desember itu untuk urusan birokrasi sudah selesai," ujar Netty di Denpasar, Bali, Jumat (19/9/2025) lalu.

Netty menegaskan, keterlambatan operasional dapur dapat menghambat tujuan utama program MBG, yakni peningkatan status gizi anak-anak. Untuk itu, ia mendorong agar koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pemerintah daerah diperkuat agar pelaksanaan program lebih efektif.

"Seharusnya ada koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah dimanapun dia berada.

Mempercepat Pembangunan Dapur MBG

Target pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tinggal menyisakan waktu dua bulan. Pembangunan dapur MBG di seluruh tanah air diimbau segera terbangun, ini untuk mempercepat akses program MBG ke seluruh sekolah.

Karena penentuan titik-titik dapur seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, maupun provinsi," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Iwan Dwi Susanto, menyebutkan bahwa pihaknya tengah berupaya



FOTO: AGUNG/VEL

mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan lahan milik negara dan pemerintah daerah.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri serta pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan dapur MBG, termasuk memanfaatkan tanah BMN, Kodim, maupun pemda,"



Seharusnya ada koordinasi antara BGN dengan pemerintah daerah dimanapun dia berada. Karena penentuan titik-titik dapur seharusnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah, baik kota, kabupaten, maupun provinsi

Netty Prasetyani
Anggota Komisi IX DPR RI

jelasan. Komisi IX berharap, percepatan ini dapat memastikan anak-anak segera menikmati manfaat program MBG, sehingga target penurunan angka stunting dapat tercapai sesuai dengan arahan presiden.

Sementara Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana, mengungkapkan, dari sekitar 350 dapur yang terdaftar, baru 68 dapur yang berjalan. "Kami ingin tahu proyeksinya, kira-kira kapan dapur-dapur selanjutnya bisa beroperasi cepat dan bisa memenuhi target yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apakah ada tenggat waktu dari yang terdaftar itu sampai

dilakukan dengan survei lapangan ke pasar dan bekerja sama dengan rekanan penyedia. "Kita survei lapangan di pasar, kita menanyakan di mana ngambilnya. Jadi, dari rekanan kita ambil beberapa bahan bakunya itu ada dari Denpasar untuk sayur dan daging ayam," terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar Anak Agung Gede Wiratama, menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait penyediaan lahan dapur. Namun, keterbatasan aset menjadi kendala utama.



FOTO: AGUNG/VEL

Anggota Komisi IX DPR RI Sri Meliyana saat meninjau dapur MBG di Denpasar, Jumat (19/9/2025).

beroperasi?" tanya Meliyana di Denpasar, Jumat (19/9/2025) lalu.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Plawa, Denpasar, menjelaskan alur pelaksanaan dapur. Menurutnya, proses pengadaan bahan baku

"Pemerintah kota tidak memiliki tanah, semua tanah milik provinsi. Sudah kami koordinasikan dan usulkan pembangunan ke provinsi. Kendala lainnya adalah biaya sewa lahan yang lebih mahal dibandingkan kabupaten lain," ungkapnya. **aha/mh**

SKO dan Wisata Olahraga Butuh Perhatian

Sekolah Khusus Olahraga (SKO dan wisata olahraga (sport tourism) jadi perhatian serius Komisi X DPR RI dalam beberapa kunjungan kerja ke daerah. Para siswa SKO di daerah perlu diperhatikan akses pendidikannya, lantaran kerap berbenturan dengan agenda olahraganya. Sementara soal wisata olahraga, bagaimana menggelar event olahraga yang bisa mengundang masyarakat untuk menonton sebagai pilihan destinasi wisata.

Di Surakarta, Jawa Tengah, persoalan SKO jadi perbincangan. Dua kepentingan para siswanya, pendidikan dan latihan olahraga, kerap berbenturan waktu. Ini menimbulkan masalah pendidikan bagi para siswanya. Pemerintah Kota Surakarta

telah memberi perhatian serius atas persoalan ini.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mengemukakan pandangannya kepada Parlemenaria, Kamis (18/9/2025) lalu. Pemerintah Surakarta sendiri terdapat SKO setingkat SMP. "Kehadiran sekolah ini menjadi best practice yang

patut dicontoh, karena mampu mengintegrasikan pendidikan formal dengan pembinaan prestasi olahraga sejak dini," kata Fikri.

Meski demikian, tantangan muncul ketika para siswa SKO harus melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA. Di Solo, memang, sudah tersedia SMA dengan kelas khusus



FOTO: HUSEN/VEL

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Solo, Jawa Tengah.

olahraga. Namun, fasilitas tersebut belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang ada. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pun telah menyiapkan beberapa SMA dengan kelas khusus olahraga.

"Permasalahan utama terletak pada kesinambungan pendidikan atlet dengan jadwal latihan dan pertandingan yang padat. Undang-Undang Keolahragaan Nasional serta Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perlu menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif. Hal ini penting agar sistem pendidikan tidak berbenturan dengan kebutuhan atlet yang kerap harus mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) dalam waktu lama," pandang Fikri.

Kondisi tersebut sering membuat para atlet berisiko tertinggal dalam akademik, bahkan ada yang terpaksa tidak naik kelas karena absen satu semester penuh. Padahal, mereka sedang menjalankan tugas mulia untuk mengharumkan nama bangsa di kancah olahraga internasional. Situasi ini menimbulkan dilema, sebab hak pendidikan mereka seharusnya tidak boleh terabaikan.

Ke depan, lanjut politisi PKS ini, pemerintah pusat diharapkan mengambil langkah lebih serius menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan atlet. Model pendidikan keolahragaan seperti yang telah berjalan di Solo dapat dijadikan rujukan nasional. Dengan sistem yang terintegrasi, para atlet dapat mengembangkan prestasi olahraga tanpa harus kehilangan haknya dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Masih di Solo, Surakarta, Komisi X juga membincang wisata olahraga yang perlu dikembangkan. Kota Solo sendiri memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata olahraga unggulan di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut, saat mengikuti pertemuan



Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono, usai pertemuan Komisi X dengan Wali Kota Surakarta dan para insan olahraga di Solo, Kamis (18/9/2025).



Permasalahan utama terletak pada kesinambungan pendidikan atlet dengan jadwal latihan dan pertandingan yang padat.

Abdul Fikri Faqih
Anggota Komisi X DPR RI

Komisi X dengan Wali Kota Surakarta dan para insan olahraga di Solo, Kamis (18/9/2025) lalu. "Alhamdulillah, Solo mencanangkan sebagai spot tourism, bagaimana rekreasi itu lebih didekatkan pada persoalan-persoalan olahraga," ujarnya.

Menurutnya, Solo memiliki kelebihan karena berhasil menyelenggarakan berbagai

even internasional dengan cukup sukses. Lebih lanjut, Juliyatmono menambahkan bahwa keberadaan SMP khusus olahraga di Solo semakin memperkuat alasan bagi Komisi X untuk memberikan dukungan penuh.

"Ini yang membuat Komisi X tertarik, oleh karena itu akan didiskusikan dan tentu akan disupport supaya benar-benar apa yang menjadi harapan wali kota bisa terlaksana dengan baik," jelasnya. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan prestasi olahraga sekaligus membangun kebugaran masyarakat.

Olahraga, lanjut anggota F-PG DPR RI ini, mempersatukan, itu yang paling substantif. Karena sehat itu produktif dan olahraga satu-satunya yang mudah terus digerakkan. Juliyatmono berharap kepada Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru untuk terus mendorong kemajuan olahraga Indonesia.

"Kami menaruh harapan besar terhadap Pak Menteri. Saya kira beliau punya visi besar terhadap kemajuan olahraga. Gagasannya juga luar biasa. Mudah-mudahan berkolaborasi dan bersinergi dengan Komisi X berjalan jauh lebih baik," pungkasnya. mh

Polemik *Payment ID* dan Rekening *Dormant*

Komisi XI DPR RI menyoroti dua isu krusial yang belakangan menimbulkan polemik, yaitu kebijakan *Payment ID* dari Bank Indonesia (BI) dan pemblokiran rekening dormant (tidak aktif) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).



Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino.

Dalam beberapa kunjungan kerja ke berbagai daerah, Komisi XI mendesak lembaga terkait untuk

memperbaiki strategi komunikasi dan sosialisasi demi menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Meskipun bertujuan baik untuk mempermudah transaksi digital

dan mencegah tindak kejahatan finansial, kebijakan *Payment ID* memicu kekhawatiran masyarakat, terutama terkait privasi data dan pengawasan.



FOTO: KIKI/VEL

Delegasi Komisi XI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja reses di Batam, Kepulauan Riau.

Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI menekankan pentingnya komunikasi yang transparan dan masif dari BI. Anggota Komisi XI Harris Turino menyatakan kekhawatiran bahwa narasi negatif di publik dapat merusak tujuan baik dari kebijakan ini. "Sosialisasi harus dilakukan dengan benar agar tidak menimbulkan kesan pengawasan total terhadap transaksi," tegasnya saat kunjungan kerja di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (12/8/2025) lalu.

Sementara itu, dalam kunjungan kerja ke Balikpapan, Anggota Komisi XI Amin AK mengingatkan bahwa sosialisasi adalah kunci keberhasilan Payment ID. Menurutnya, BI perlu aktif menekan mispersepsi bahwa semua data pribadi dan keuangan akan terbuka tanpa batas. Ia menjelaskan, Payment ID hanya akan mengakses data yang relevan untuk mencegah



Anggota Komisi XI Amin AK saat kunjungan kerja di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2025).



Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris.

kecurangan, penghindaran pajak, dan money laundering.

"Keamanan data harus jadi prioritas, tapi sosialisasi tidak kalah pentingnya. Masyarakat perlu tahu manfaatnya dan apa yang tidak dilakukan sistem ini," kata Amin di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (13/8/2025) lalu. Selain isu Payment

ID, Komisi XI juga menyoroti kebijakan PPAK yang memblokir 122 juta rekening dormant, karena dianggap berpotensi digunakan untuk kejahatan, termasuk judi online. Anggota Komisi XI Andi Yuliani Paris menilai, kebijakan ini dapat membuat masyarakat malas menabung di bank dan memicu penarikan uang secara massal.

"Ini sebenarnya sangat disayangkan karena ini akan berpengaruh. Pertama pengaruhnya apa? Orang malas nabung di bank," ujar Andi di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025) lalu. Andi mengeritik alasan PPAK yang dinilainya tidak masuk akal, karena rekening yang digunakan untuk judi online justru akan terus aktif. Ia khawatir rekening yang diblokir adalah milik masyarakat yang sengaja menyimpan uangnya untuk keperluan darurat atau masa depan.

qq.ndn,um/mh



Anggota Komisi XI Andi Yuliani Paris saat mengikuti kunjungan kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/8/2025).

Memulihkan Industri Timah



Ketua Komisi XII Bambang Patijaya saat memimpin pertemuan Komisi XII dengan otoritas PT. Timah digelar di Gedung PT. Timah, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, Senin (11/8/2025).

Pada kunjungan kerja Komisi XII DPR RI ke Bangka Belitung yang dipimpin Ketua Komisi XII Bambang Patijaya, muncul dorongan agar industri pertimahan bisa melibatkan masyarakat. Pertemuan Komisi XII dengan otoritas PT. Timah digelar di Gedung PT. Timah, Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, Senin (11/8/2025) lalu.

"Pada dasarnya kita ingin pertimahan ini dapat kembali pulih. Kemudian pelaksanaan pertambangan timah dalam kata kelolanya melibatkan masyarakat. Kemudian kita ingin di dalam perizinan pertimahan yang dilakukan masyarakat dapat kita berikan secara maksimal, sehingga masyarakat

Industri timah di Bangka Belitung diharapkan bisa melibatkan masyarakat luas, agar pulih dan berkembang optimal. Pertambangan rakyat juga perlu ditata kembali dengan payung hukum yang memadai.

dapat bekerja tidak kucing-kucinganlah dengan persoalan hukum," ujar Bambang.

Ia juga mengapresiasi tagline baru PT. Timah, "Timah untuk Rakyat" yang diharapkan menjadi dasar pelaksanaan operasi perusahaan. Politisi Partai Golkar itu mengusulkan pola kemitraan antara PT. Timah, perusahaan swasta, dan penambang

rakyat. Ia mengatakan, jika aktivitas penambangan berada di area IUP (Izin Usaha Pertambangan) PT. Timah, maka PT. Timah merangkul penambang dengan memberikan Surat Perintah Kerja (SPK). Sementara itu, penambangan di IUP swasta dapat bermitra langsung dengan pemegang konsesi.

Konsep ini, kata Bambang, meniru

pola kemitraan di sektor migas, di mana masyarakat yang melakukan pengeboran di konsesi Pertamina atau swasta difasilitasi secara legal. Selain itu, Bambang menyoroti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2025 yang mengatur kenaikan royalti timah secara progresif. Ia menilai kebijakan ini perlu diiringi upaya merangkul tambang-tambang inkonvensional (TI) agar memiliki legalitas.

"Kan, tadi yang kita bilang bagaimana kita merangkul dan memberikan aspek legalitas karena yang namanya beberapa TI (Tambang Inkonvensional), ya kita enggak bilang itu ilegal. TI yang beroperasi ini bisa kita rangkul, kita berikan perizinannya," jelasnya. Melalui langkah ini, Bambang berharap tata kelola pertambangan timah ke depan dapat berjalan dengan asas

kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, serta berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

LNG Benoa

Di Bali, Komisi XII meninjau terminal LNG Benoa yang dioperasikan PT. Pelindo Energi Logistik. Komisi XII ingin memastikan proyek energi di daerah berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan standar keselamatan.

Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan, menilai terminal LNG Benoa memiliki potensi besar untuk dikembangkan ke depan. "Saya melihat kondisi tempat yang ada itu sangat mendukung untuk dilaksanakannya pengembangan. Namun, ada beberapa aspek, aspek sosial dan persoalan lingkungan yang perlu menjadi perhatian," ujarnya, Senin (11/8/2025) lalu.

Zulfikar menekankan pentingnya memperhatikan masukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan pihak terkait dalam penyusunan rencana tata letak fasilitas. "Kita perlu meminta perubahan set plan tentang tata letak yang sesuai dengan masukan Kementerian Lingkungan Hidup. Jangan sampai konsepnya hanya sebatas gambar yang kita lihat tadi, tetapi rekomendasi lingkungan belum diakomodasi," katanya.

Selain itu, ia menyoroti aspek keamanan fasilitas LNG yang dinilai belum optimal. LNG (Liquefied Natural Gas) memiliki risiko tinggi karena sifatnya yang mudah menguap pada tekanan rendah dan dapat memicu ledakan bila terjadi kebocoran. "Kalau saya lihat pipanya sangat dekat dari kantor. Safety-nya itu di mana? Apakah aman seperti itu kondisinya nanti. Jangan sampai kita berpikir setelah kejadian, sebelum kejadian tidak pernah kita pikirkan," tegasnya.

Zulfikar membandingkan pengelolaan fasilitas LNG di Singapura yang memisahkan jalur pipa dari area lalu lintas manusia. "Kalau di sana, pipa dengan jalur manusia itu dipisahkan. Kalau di sini, jujur saya agak khawatir. Namanya manusia kita tidak tahu apesnya, pas kita di situ bisa saja terjadi sesuatu," keluhnya.

Terminal LNG Benoa sendiri memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 26.000 m³ dan fasilitas regasifikasi hingga 50 MMSCFD. Infrastruktur ini mendukung pasokan energi bersih bagi pembangkit listrik, sektor transportasi, dan industri perhotelan di Bali. Namun, sesuai rekomendasi Zulfikar, pengembangan lebih lanjut perlu mengedepankan tata letak yang aman, jarak aman pipa dari area kerja, serta mitigasi risiko kebocoran atau ledakan sesuai standar internasional seperti yang diatur dalam NFPA 59A (Standard for the Production, Storage, and Handling of LNG).  **srw/ssb/mh**



Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan saat kunjungan kerja reses ke Provinsi Bali, Senin (11/8/2025).

FOTO: EKO/WEL

Digitalisasi Layanan Imigrasi

Di era disrupsi ini, saatnya semua layanan publik melakukan digitalisasi untuk memudahkan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dokumen. Ini penting dilakukan termasuk layanan pada kantor imigrasi. Indonesia harus belajar banyak pada Singapura yang sudah sepenuhnya menggunakan sistem digital.

kualitas layanan imigrasi. Komisi XIII akan mengevaluasi secara serius apabila masukan tersebut tidak segera ditindaklanjuti. Ia juga menyinggung pentingnya strategi geostrategis dalam pengelolaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) serta perlunya sinergi Badan Pengusahaan (BP) Batam, agar manfaat ekonomi bisa

ini yang mengemuka saat Komisi XIII DPR RI menggelar pertemuan dengan otoritas imigrasi di Batam, Kepulauan Riau. Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegaskan, penting memodernisasi dan digitalisasi layanan imigrasi dalam menghadapi era disrupsi. "Teman-teman, kita ini hidup dalam era disrupsi. Kalau kita tidak memanfaatkan big data dan internet of things, kita justru mempermalukan diri kita sendiri," tegas Willy di hadapan pejabat Ditjen Imigrasi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam, dan Kepala Kantor Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Kamis, (28/8) lalu.

Menurut Willy, Indonesia harus belajar dari Singapura yang telah lebih maju dalam mengembangkan sistem digital, termasuk dalam layanan imigrasi dan keamanan perbatasan. "Singapura sudah bisa mendeteksi isi ponsel atau kadar alkohol seseorang saat masuk. Sementara kita masih manual. Itu artinya, kita sedang menampar diri kita sendiri," ujarnya.

Willy mendorong Ditjen Imigrasi segera mengembangkan aplikasi layanan imigrasi berbasis digital, baik skala nasional maupun khusus untuk Batam. "Dulu di masa Covid-19 kita punya aplikasi. Kenapa



Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat Kunjungan Kerja Spesifik ke Batam, Provinsi Kepulauan Riau, bersama jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi, Kamis, 28/8/2025.

sekarang tidak dikembangkan lagi? Kalau perlu Batam buat sistem khusus, tidak masalah. Yang penting kita harus berbenah," harap Willy.

Selain itu, Willy juga menyoroti pentingnya instrumen survei untuk memantau kondisi lapangan dan meningkatkan

dirasakan langsung oleh masyarakat perbatasan.

"Kita jangan hanya jadi penonton. Event besar seperti Pacu Jalur bisa mendunia, tapi masyarakat di sini hanya dapat keramaiannya. Harusnya ada multiplier effect bagi ekonomi lokal," ungkapnya. Willy menutup pernyataannya dengan ajakan untuk

bersama-sama memperkuat sistem layanan imigrasi demi kepentingan nasional. "Ini soal kepentingan kita bersama, bukan sekadar kepentingan segelintir orang. Pertanyaannya, kita mau terus tertinggal atau mau berbenah?" tutupnya.

Tindak Pidana Perdagangan Orang

Di Surabaya, Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, menyoroti meningkatnya potensi tindak

"Ada isu-isu seperti tindak pidana perdagangan orang dan lalu lintas manusia yang harus menjadi perhatian, mengingat banyaknya industri dan pelabuhan khusus di Jawa Timur. Arus keluar-masuk orang asing sangat tinggi, dan ini memerlukan pengawasan ekstra," ujar Andreas di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/8) silam.

Andreas juga mengungkapkan kekhawatiran atas tingginya angka kedatangan warga negara asing (WNA) ke Jatim. Berdasarkan data sementara yang disampaikan dalam

karena sisanya bisa saja masih tinggal secara ilegal atau menyalahgunakan izin tinggalnya," tegasnya.

Fenomena ini, menurut Andreas, bisa menjadi pintu masuk bagi praktik-praktik eksploitasi tenaga kerja asing dan jaringan perdagangan manusia lintas negara. Komisi XIII DPR mendorong Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur memperkuat fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian, khususnya di daerah-daerah rawan seperti kawasan industri, pelabuhan, dan perbatasan.



Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, saat kunjungan kerja spesifik Komisi XIII ke Kantor Wilayah Imigrasi Jawa Timur, Kamis (28/8/2025).

pidana perdagangan orang (TPPO) dan lalu lintas manusia di Jawa Timur. Jatim sebagai pusat industri dan perdagangan ditambah keberadaan pelabuhan-pelabuhan khusus, menjadikan provinsi ini sangat rentan terhadap praktik-praktik ilegal seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia.

pertemuan tersebut, terdapat selisih signifikan antara jumlah WNA yang datang dan yang kembali ke negara asal.

"Kalau kita lihat data, ada lebih dari 70 ribu WNA yang masuk dari salah satu negara, tapi yang tercatat kembali hanya sekitar 40 ribuan. Ini jelas harus menjadi perhatian serius

"Kami akan terus mendukung peningkatan kapasitas SDM dan teknologi di lapangan agar bisa mendeteksi dan mencegah aktivitas ilegal sejak dini. Fungsi pengawasan harus ditingkatkan, bukan hanya administratif tetapi juga secara intelijen dan kolaboratif," tambahnya.

dep,uf/mh

Menstabilkan Kembali Harga Beras

Harga beras terus bertahan tinggi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini memunculkan polemik di tengah masyarakat. Situasi ini bukan hanya menyangkut urusan ekonomi, tetapi juga menyentuh kepentingan sosial yang paling mendasar: kemampuan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Dari Senayan, Komisi IV DPR RI menyoroti serius persoalan ini dan menuntut langkah konkret pemerintah.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, akrab Titiek Soeharto, menekankan bahwa lonjakan harga beras menambah daftar panjang masalah pangan. Tidak hanya beras, harga bawang merah hingga minyak goreng juga merangkak naik, mempersempit ruang konsumsi rumah tangga berpendapatan rendah.

Kondisi ini semakin berat, karena di lapangan muncul praktik curang berupa beras oplosan yang dipasarkan dengan label premium, namun kualitasnya tidak sesuai standar. Titiek menilai, praktik semacam ini merusak kepercayaan konsumen dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

Selain itu, harga gabah kering panen (GKP) yang kini mencapai Rp7.000–Rp7.500/kg di tingkat petani, jauh di atas HPP Rp6.500/kg, juga menimbulkan dilema. Penggilingan kesulitan menghasilkan beras sesuai HET, sementara konsumen dipaksa menanggung harga yang semakin mahal. Dalam pandangan Titiek, inilah bukti nyata ada ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan.

Titiek menegaskan, Komisi IV



Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi.

DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat untuk memastikan kebijakan pangan benar-benar berpihak kepada petani sekaligus melindungi masyarakat. Kedaulatan pangan, menurutnya, adalah tanggung jawab moral dan politik yang tidak bisa ditawar.

Sorotan berikutnya datang dari Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan. Ia mengingatkan

bahwa keberadaan stok pangan nasional yang besar tidak otomatis mencerminkan kestabilan harga di pasar. Menurutnya, masyarakat kerap mendapat informasi stok berlimpah, namun realitas di lapangan justru harga semakin melambung.

Rendahnya realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut menjadi penyebab utama. Dari target 1,5 juta ton,



Keberadaan stok pangan nasional yang besar tidak otomatis mencerminkan kestabilan harga di pasar.

Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan.
FOTO: OJI/VEL



Penyerapan beras pascapanen yang seharusnya dilakukan segera, justru molor hingga harga telanjur naik

Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono.
FOTO: OJI/VEL



Penting memperbaiki sistem aplikasi Klik SPHP yang digunakan para pengecer.

Anggota Komisi IV DPR RI Ananda Tohpati.
FOTO: OJI/VEL



Pelibatan TNI/Polri juga menyebabkan munculnya tambahan biaya overhead di institusi tersebut

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman. FOTO: OJI/VEL

baru sekitar 230 ribu ton atau 15 persen yang tersalurkan. Kondisi ini menunjukkan ada hambatan serius dalam distribusi yang perlu segera dijawab oleh pemerintah.

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan kepada penggilingan padi kecil dan menengah. Menurutnya, kualitas beras nasional sangat ditentukan oleh teknologi penggilingan, sehingga dukungan berupa hibah mesin maupun skema kredit murah menjadi kebutuhan mendesak agar penggilingan kecil tetap mampu bersaing.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, menilai pelaksanaan program SPHP kerap mengalami keterlambatan. Penyerapan beras pascapanen yang seharusnya dilakukan segera, justru molor hingga harga telanjur naik. Akibatnya, stabilisasi harga menjadi sulit dicapai.

Ia juga menyoroti lemahnya penguasaan cadangan beras oleh pemerintah. Saat ini, hanya sekitar 5 persen stok yang dikuasai negara, sementara sisanya berada di tangan swasta. Kondisi ini membuat ruang kendali pemerintah sangat terbatas.

Riyono menekankan evaluasi berkala terhadap kebijakan HET. Idealnya setiap tiga hingga enam bulan sekali, agar selaras dengan dinamika pasar.

Selanjutnya dalam rapat bersama Dirut Bulog, Anggota Komisi IV DPR RI lainnya yaitu Ananda Tohpati mengingatkan agar distribusi beras SPHP segera dipercepat. Masih ada 1,3 juta ton beras SPHP yang belum tersalurkan, padahal langkah ini menjadi instrumen penting untuk meredam gejolak harga di pasar.

Selain itu, ia menekankan penting memperbaiki sistem aplikasi Klik SPHP yang digunakan para pengecer. Banyak laporan mengenai kesulitan akses, sehingga diperlukan penyederhanaan sistem serta sosialisasi yang lebih luas agar beras SPHP bisa segera sampai ke masyarakat.

Seruan tajam juga dilontarkan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman yang menilai keberadaan 80 ribu Koperasi Merah Putih (KMP) yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto seharusnya dapat dimanfaatkan

untuk mendukung penyaluran beras SPHP. Seperti diketahui, Presiden Prabowo meresmikan peluncuran kelembagaan 80.081 Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih (KDMP/ KKMP), pada 21 Juni lalu.

Alex mengatakan, pelibatan TNI/Polri dalam penyaluran beras cadangan pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog melalui program SPHP, memang secara cepat dapat menahan gejolak harga beras di pasaran. Namun, menurut Alex, pelibatan TNI/Polri juga menyebabkan munculnya tambahan biaya overhead di institusi tersebut, lantaran harus memobilisasi beras SPHP dari gudang Bulog ke kantong-kantong distribusi.

Karenanya ke depan, Polri diimbanya tak perlu lagi dilibatkan urusan teknis tersebut mengingatkan sudah ada KMP yang diresmikan. Alex meyakini dengan memanfaatkan keberadaan KMP yang sudah tersebar di pelosok negeri maka gejolak harga beras akan cepat teratasi. Apalagi, stok beras di gudang Bulog terbilang sangat besar, yakni 4 juta ton atau 4 miliar kilogram. **pun/mh**

Indonesia Bersuara, DPR Mendengar

Suasana politik nasional yang dinamis pada akhir Agustus dan awal September 2025 menjadi momentum bagi DPR RI untuk meneguhkan jati dirinya sebagai rumah rakyat. Gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung di berbagai daerah disikapi DPR dengan membuka ruang dialog secara langsung.

Pimpinan DPR menerima perwakilan 16 organisasi kemahasiswaan, mulai dari BEM Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, hingga HMI dan IMM. Pertemuan yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung

Nusantara, Senayan, awal September lalu, berlangsung hangat dan penuh keterbukaan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan, dialog semacam ini adalah bagian dari komitmen berkelanjutan lembaga. "Dialog dan

diskusi dengan mahasiswa, organisasi kepemudaan, maupun masyarakat sipil adalah bagian dari komitmen DPR untuk terus mendengarkan aspirasi. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk kecintaan kita terhadap bangsa, negara, dan rakyat," ujarnya.

Pada hari yang sama, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI turut menerima masukan dari DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Anggota BAM Andre Rosiade, menekankan bahwa DPR selalu terbuka terhadap gagasan konstruktif yang dapat memperkuat kinerja parlemen ke depan.

Ketua DPR Gelar Dialog

Rangkaian penyerap aspirasi berlanjut pada 4 September. Ketua DPR RI Puan Maharani menggelar dialog bersama akademisi, pakar, serta pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Mujadalah Kiai Kampung.

Pertemuan selama dua jam itu memberi ruang terbuka bagi



Pimpinan DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Saan Mustopa menerima perwakilan mahasiswa dari 16 organisasi kemahasiswaan di DPR RI, Jakarta, Rabu (3/9/2025).

FOTO: RUNI/ANDRI



Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dalam acara dialog dan diskusi dengan mahasiswa dan tokoh masyarakat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).



Anggota DPR RI Andre Rosiade berorasi, menerima para demonstran, di depan Gedung DPR RI, Senayan.



Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

masukannya strategis dari masyarakat sipil. Dalam kesempatan tersebut, Puan menyampaikan apresiasi sekaligus permohonan maaf.

"Saya minta maaf jika ada anggota yang bertutur atau berlaku kurang berkenan. Memang ada beberapa informasi yang beredar, tapi tidak semuanya sesuai fakta," ucapnya.

Ia menegaskan, isu kenaikan gaji anggota DPR tidak benar. Tunjangan perumahan anggota DPR bahkan telah dihentikan per 31 Agustus. Sementara moratorium kunjungan kerja luar negeri diberlakukan mulai 1 September. Lebih jauh, Puan menekankan agenda transformasi DPR RI. "Semua laporan kegiatan dan rapat terbuka DPR sekarang sudah dimuat di website DPR. Kami sungguh-sungguh ingin melakukan transformasi kelembagaan. DPR harus lebih terbuka, aspiratif, dan akuntabel," serunya

Gerbang Pancasila: Aspirasi Kolektif 17+8

Di hari yang sama, Kamis (4/9) sore, DPR kembali menunjukkan keterbukaan dengan menemui kolektif influencer dan aktivis yang membawa 17+8 Tuntutan Rakyat di depan Gerbang Pancasila, Kompleks Parlemen. Anggota DPR RI Andre

Rosiade dan Rieke Diah Pitaloka menerima dokumen tersebut secara langsung, disaksikan figur publik seperti Andovi dan Jovial Da Lopez, Jerome Polin, hingga Fathia Izzati. Andre memastikan dokumen aspirasi itu diproses secara resmi.

"Nanti saya, kami akan beri tanda terima, bukti dokumen teman-teman sudah diterima secara resmi oleh DPR RI dan dokumen ini akan kami serahkan langsung ke pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya," ujar legislator Gerindra itu.

Rieke menambahkan, DPR menaruh perhatian serius pada aspirasi publik. "Insyaallah kita pihak yang berwenang di dalam memenuhi ini. Tentu saja secara pribadi dan kami yang hadir di sini menyampaikan duka cita mendalam atas jatuhnya korban yang kemarin," ucapnya.

Keputusan Strategis: DPR Berbenah

Rangkaian dialog tersebut berujung pada rapat pimpinan DPR bersama fraksi-fraksi pada 5 September 2025. Dari pertemuan itu lahir sejumlah keputusan penting yang mencerminkan langkah konkret DPR merespons suara masyarakat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco

Ahmad menyampaikan hasil rapat secara terbuka kepada publik.

"DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, moratorium kunjungan kerja luar negeri DPR juga diberlakukan sejak 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan," tegas Dasco.

Tak berhenti di situ, DPR juga memangkas sejumlah fasilitas, mulai dari biaya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi. Anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai juga tidak lagi menerima hak-hak keuangan. "Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan DPR mendengar aspirasi publik dan melakukan langkah nyata. Kami tidak hanya mendengar, tapi juga menindaklanjuti dengan kebijakan yang terukur," tambahnya.

Komitmen DPR untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik menjadi semakin jelas. Aspirasi rakyat kini menjadi dasar penting bagi parlemen dalam meneguhkan transformasi kelembagaan. Dengan langkah ini, DPR RI menegaskan diri sebagai institusi yang tidak hanya mendengar, tetapi juga bekerja demi kepentingan bangsa dan rakyat. **uc/mh**

Budi Sulistyono Kanang

Dorong Percepatan Program Kesehatan dan Pendidikan

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Budi Sulistyono Kanang mendorong penguatan sektor kesehatan dan pendidikan lewat hibah ambulans.



Anggota DPR RI, Budi Sulistyono Kanang saat menyerahkan hibah ambulans untuk Desa Widodaren, Ngawi, sebagai wujud dorongan percepatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Suasana di Kantor Desa Widodaren, Ngawi, Jatim, Minggu siang, akhir Juli lalu, tampak berbeda dari biasanya. Warga berkumpul dengan antusias untuk menyambut hadirnya satu unit mobil ambulans yang akan dipergunakan untuk hajat hidup orang banyak di sana. Ambulans tersebut diamanahkan oleh Budi Sulistyono

Kanang.

Peruntukan hibah itupun menjadi upaya memperluas jangkauan layanan kedaruratan masyarakat. Mobil ambulans berkelir putih itu, akan siang-malam siaga di Desa Widodaren dan dapat digunakan sewaktu-waktu oleh masyarakat setempat untuk kebutuhan darurat. Kepala Desa Widodaren Woko Supriyanto pun memanjatkan syukur

dan rasa terima kasih, sebab fasilitas ambulans di lingkup pertiwinya itu bisa digunakan bila ada situasi darurat.

Sedangkan dalam pandangan Kanang, ambulans ini bukan sekadar pemberian, melainkan wujud sinergi dengan dunia usaha. Unit tersebut hadir berkat dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Syariah Indonesia (BSI). "Selama program itu membawa manfaat dan masyarakat siap mengelolanya, tentu kami dukung," kata mantan Bupati Ngawi dua periode itu, yang kini juga menjabat Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur.

Bukan sebatas seremoni, ambulans juga menjadi simbol isu yang lebih luas: percepatan program prioritas di sektor kesehatan dan pendidikan. Menurut Kanang, dua sektor tersebut masih belum tersentuh optimal. Padahal, dua sektor ini apabila disentuh secara serius, maka banyak persoalan bangsa yang bisa diselesaikan sedari akarnya.

Legislatif dapil Jatim VII ini pun tak mau penyelesaian masalah bangsa hanya berhenti di tataran program yang sifatnya seremonial. Masalah pendidikan khususnya, diperlukan inovasi yang lebih tajam, berbasis potensi sumber daya yang dimiliki negara. "Masalah pendidikan tidak cukup diselesaikan hanya dengan mendirikan Sekolah Rakyat, begitu juga stunting tak bisa hanya lewat program MBG. Harus ada langkah yang lebih menyentuh akar permasalahan," ujarnya.  ujim/mh

Rycko Menoza

Dorong Generasi Muda Bangun Pariwisata Lampung

Anggota Komisi VII DPR RI Rycko Menoza, menunjukan konsistensinya mengawal pembangunan pariwisata di daerah pemilihannya, Lampung I. Melalui dialog bertema “Mari Bicara” bersama 100 peserta meliputi mahasiswa, akademisi, dan masyarakat, dialog digelar dengan semangat menyerap aspirasi masyarakat.



Anggota DPR RI Rycko Menoza, saat melakukan dialog serap aspirasi untuk mengawal pembangunan pariwisata di Dapilnya, Lampung I.

Dalam sambutannya, Rycko menegaskan bahwa industri pariwisata harus menjadi tumpuan pembangunan daerah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Ia menyoroti masih terbatasnya pengelolaan potensi wisata di Lampung yang dikenal memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah.

"Industri pariwisata adalah salah satu sektor pemasukan devisa yang besar. Namun, hingga kini pariwisata

di Indonesia, khususnya di Lampung, belum maksimal. Ini menjadi tugas kita bersama, baik mahasiswa maupun elemen masyarakat, untuk berkontribusi menggali potensi yang ada di Sai Bumi Ruwa Jurai ini," tegas Rycko

Menurutnya, pembangunan desa wisata merupakan salah satu kunci dalam mengembangkan pariwisata. Desa wisata tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi kreatif dan UMKM lokal. Pemanfaatan

media sosial secara kreatif dan konsisten dapat menjadi cara paling efektif untuk mempromosikan destinasi wisata.

"Kalau kita mau mendukung pemerintah meningkatkan sektor pariwisata, mulailah dari desa. Desa wisata harus menjadi bagian penting dalam peta pengembangan pariwisata Lampung. Pemanfaatan media sosial harus dimaksimalkan untuk memperkenalkan objek wisata, baik kepada turis domestik maupun mancanegara," jelasnya. 

Rocky Candra

Meninjau Sekolah Rakyat

Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Gerindra Rocky Candra, meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Jambi yang berlokasi di Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Dalam kunjungan tersebut, Rocky meninjau proses belajar, asrama, dan sarana prasarana sekolah yang saat ini masih menempati gedung milik Kementerian Sosial. Ia memastikan implementasi Program Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai tujuan. "Sekolah Rakyat bukan hanya tempat belajar, tetapi simbol keseriusan negara memutus rantai ketidaksetaraan. Anak-anak di sini berhak mendapat fasilitas pendidikan

setara dengan yang ada di kota-kota besar," ujar Rocky.

Rocky menyebut program ini strategis untuk pemerataan akses pendidikan, pembentukan karakter kebangsaan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sekolah agar program berkelanjutan.

Kunjungan ini disambut antusias kepala sekolah, guru, dan siswa. Selain berdialog, Rocky memotivasi para siswa agar berani bermimpi besar. "Saya dulu berasal dari

keluarga sederhana, pernah bekerja sebagai kuli, tukang parkir, hingga penjual pempek keliling. Tapi dengan usaha dan kerja keras, saya bisa menjadi anggota DPR RI. Jadi, semangat belajar dan jangan lupa berdoa," pesannya.

Rocky berharap Jambi dapat menjadi contoh daerah yang sukses memanfaatkan Program Sekolah Rakyat untuk mencetak generasi cerdas, tangguh, dan berkarakter, sejalan dengan visi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. **fa/mh**



Anggota Komisi DPR RI Rocky Candra, saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 5 Jambi.

FOTO: IST/VEL

Rachmat Gobel Menanam Bambu Petung



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI, Rachmat Gobel, saat ikut menanam bambu petung di Gorontalo.

Anggota DPR RI dari Dapil Gorontalo Rachmat Gobel, menegaskan komitmennya untuk ikut langsung menanam bambu petung pada November 2025 mendatang. Ia menyebut program menanam bambu petung sebagai model pembangunan hijau yang bisa direplikasi di seluruh kabupaten di Gorontalo.

“Boalemo menunjukkan bahwa melawan pemanasan global bisa sekaligus membuka peluang ekonomi. Inilah pembangunan berkelanjutan yang nyata,” ucap Gobel saat berkunjung ke Boalemo, Gorontalo, awal September silam.

Kabupaten Boalemo tengah bersiap memasuki babak baru

pembangunan ekonomi yang berpihak pada lingkungan. Melalui inisiatif penanaman bambu petung seluas 1.000 hektare, pemerintah daerah bersama legislator Rachmat Gobel menggagas konsep ekonomi hijau yang menyatukan kepentingan ekologi dan kesejahteraan rakyat.

Bambu petung selama ini dikenal sebagai jenis bambu unggulan Indonesia dengan pasar luas. Selain digunakan untuk bahan bangunan dan furnitur, rebungnya bisa diolah jadi makanan, sementara seratnya potensial bagi industri kertas dan tekstil ramah lingkungan.

Dengan meningkatnya tren produk hijau dan keberlanjutan di pasar global, bambu petung berpeluang besar menjadi komoditas ekspor unggulan. Boalemo berpotensi menjadi sentra produksi sekaligus pusat inovasi produk berbasis bambu. Program ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Dengan sistem perakaran yang kuat dan daya serap karbon tinggi, bambu petung juga melindungi lahan dari erosi dan membantu menekan emisi karbon.  aha/mh



Anggota DPR RI, Mafirion salurkan bantuan bagi korban kebakaran di Pulau Kijang, Indragiri Hilir, sebagai bentuk kepedulian dan upaya meringankan beban masyarakat terdampak.

Mafirion Salurkan Bantuan Korban Kebakaran

Kebakaran puluhan rumah padat penduduk yang terjadi awal September lalu di Kelurahan Pulau Kijang, Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau mendapat perhatian dari Anggota DPR RI Mafirion.

Legislator dari dapil Riau II ini menyalurkan bantuan berupa uang tunai, makanan siap saji, dan air bersih melalui tim relawannya. "Kami berduka dengan adanya kebakaran yang melanda masyarakat di Riau ini. Kebakaran ini tentunya memberikan duka mendalam bagi para korban kebakaran. Kami berharap, bantuan yang kami berikan dapat membantu meringankan beban mereka. Kami

juga berharap peristiwa kebakaran ini tidak terulang lagi," ungkapnya, awal September lalu.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui Ketua Relawan Mafirion, Achmad Fitrizal yang disaksikan Camat Reteh, Lurah Madani, Ketua PAC PKB Kecamatan Reteh serta para pemuka masyarakat. Politisi PKB ini meminta Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memastikan setiap kecamatan memiliki alat pemadam kebakaran sebagai upaya

pencegahan terjadinya kebakaran.

"Menurut saya, penting agar setiap Kecamatan memiliki alat pemadam kebakaran yang dapat dioperasikan dan terjangkau untuk diakses di gang atau jalan yang sempit, sehingga mencegah agar kebakaran tak semakin meluas," ungkapnya.

Pascakebakaran, sebagian besar warga masih mengungsi di rumah keluarga dan kerabat. Hingga kini, masih belum tersedia posko pengungsian yang dapat menampung para korban kebakaran. Kebutuhan mendasar seperti makanan, minuman serta pakaian layak pakai menjadi prioritas mendesak para korban kebakaran.

Ia berharap, seluruh elemen masyarakat bergotong royong membantu meringankan beban yang dialami para korban kebakaran. "Trauma yang mereka alami sebagai korban kebakaran tentunya membutuhkan pendampingan, khususnya anak-anak, perempuan, dan berusia lanjut. Kami berharap, pemerintah daerah juga memberikan pendampingan psikososial untuk membantu meminimalisir dampak trauma yang mereka alami," tambah Mafirion. **rdn/mh**

Muhammad Lokot Nasution Serap Aspirasi Pedagang

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Demokrat Muhammad Lokot Nasution, mengunjungi Pusat Pasar Medan di Jalan MT Haryono, belum lama ini. Lokot bertemu langsung dengan ratusan pedagang untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan mereka, khususnya terkait rencana revitalisasi pasar yang tengah digagas Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

memperbaiki sarana prasarana utama dan penunjang yang dibutuhkan pusat pasar ini," kata Lokot. Ia menekankan, pusat pasar memiliki peran vital sebagai sentra ekonomi di Sumatera Utara. "Medan ini dikenal sebagai kota saudagar, bukan kota industri. Karena itu, pasar tradisional harus dijaga dan ditata dengan baik, agar tetap mampu menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat," pungkasnya.  **ssb/mh**

Para pedagang menyoroti rencana proyek revitalisasi yang diserahkan kepada pihak ketiga. Menurut perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSINDO) Kota Medan, Agusmar, terdapat sekitar 3.400 pedagang dan 15.000 pekerja yang menggantungkan hidupnya di pusat pasar. Ia menilai, keterlibatan pihak ketiga berpotensi menimbulkan beban baru berupa kenaikan biaya sewa kios yang akan memberatkan pedagang.

"Kami ingin pemerintah hadir dalam permasalahan di pusat pasar ini. Silakan diperbaiki infrastruktur dengan menggunakan dana pemerintah tanpa melibatkan pihak ketiga," ujar Agusmar. Menanggapi hal tersebut, Lokot menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi pedagang. Ia menyebut, sebagai sosok yang berasal dari keluarga pedagang di Pusat Pasar Medan, dirinya memahami betul tantangan yang dihadapi.

"Aku akan berkoordinasi kepada Gubernur Sumut terpilih dan Wali Kota Medan terpilih untuk



Anggota DPR RI H. Muhammad Lokot Nasution, saat mengikuti pertemuan dalam kunjungan kerja.

FOTO: IST/VEL

Hendry Munief Serahkan Beasiswa, NIB, dan Sertifikat Halal



FOTO: IST/VEL

Anggota DPR RI, Hendry Munief serahkan beasiswa, NIB, dan sertifikat halal bagi masyarakat Siak sebagai dukungan pengembangan UMKM dan pendidikan.

Mengisi masa reses sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hendry Munief kembali berkeliling di Kabupaten Siak. Hendry menyerahkan sejumlah bantuan dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat Siak.

Hendry menyampaikan komitmennya atas pengembangan UMKM di Riau. Ada beberapa program andalan yang beliau kawal, seperti pengurusan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikat halal. Selain itu Hendry juga menggelar sejumlah pelatihan bagi pengusaha dan calon pengusaha UMKM. "Kita juga memfasilitasi permodalan melalui program dana KUR dengan

nilai 100 juta ke bawah tanpa agunan. Kita ingin setelah legalitas mereka lengkap, kompetensi usaha meningkat, maka tidak terkendala lagi dengan permodalan. Sehingga, yang tahun ini mereka hanya 3-4 pekerja, maka kita harapkan tahun depan naik jadi 5-10 orang," terang Hendry

Diketahui, titik pertama yang dikunjungi adalah SD IT Al Wildan, Kecamatan Tualang pada akhir September lalu. Kegiatan ini dihadiri

ratusan masyarakat yang merupakan UMKM binaannya dan wali murid penerima bantuan Beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP). Kesempatan ini dimanfaatkan sejumlah pelaku UMKM untuk bertanya tentang peran dan kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan usaha mereka.

Seperti ibu Desmiyanti yang memiliki usaha kelontong mengeluhkan permodalan. Ibu Mimi yang memiliki usaha kue menyatakan sangat terbantu atas pengurusan NIB dan sertifikat halal. Tak hanya itu, Hendry juga melaksanakan serap aspirasi di beberapa titik lainnya. Kegiatan itu dilanjutkan dengan silaturahmi dengan tokoh masyarakat Kandis, selain pemberdayaan UMKM, tokoh masyarakat Kandis menyampaikan aspirasi terkait penyerapan tenaga kerja..  hal/mh

Arisal Aziz

Ajak Warga Limapuluh Kota Perkuat Empat Pilar Kebangsaan

Di sebuah aula sederhana di Kantor DPD PAN Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, puluhan warga tampak serius menyimak paparan anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Arisal Aziz. Dengan suara tegas namun penuh keakraban, legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Sumatera Barat II itu menekankan pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat.

“ Sosialisasi ini kita gelar guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berkehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kabupaten Limapuluh Kota,” ujar Arisal di hadapan peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, kader partai, hingga pelajar. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan—Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

Menurut Arisal, keempat pilar itu bukan hanya slogan, melainkan pedoman hidup bersama agar masyarakat tetap kokoh menghadapi berbagai tantangan zaman. Ia menegaskan, di tengah kondisi sosial yang semakin kompleks, nilai toleransi dan gotong royong tidak boleh luntur. “Kita ingin masyarakat tidak hanya tahu, tapi juga mengamalkan. Dengan memahami Empat Pilar, kita bisa menjaga kerukunan dan



Anggota DPR RI, Arisal Aziz saat menggelar sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

memperkuat persatuan bangsa,” kata anggota Komisi XIII DPR RI itu.

Warga yang hadir pun menyambut baik kegiatan tersebut. Sejumlah peserta mengaku materi yang disampaikan Arisal terasa relevan, terutama dalam membangun sikap saling menghargai di tengah keberagaman.

Sosialisasi itu ditutup dengan sesi tanya jawab, di mana Arisal mendengarkan langsung masukan warga seputar pendidikan politik dan kebutuhan pembangunan di daerah. “Apa yang bapak-ibu sampaikan hari ini menjadi bahan penting bagi saya untuk dibawa ke Senayan,” tutupnya.

ssh/mh.

Menjaga Kondusivitas dan Produktivitas

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 DPR RI digelar dengan upacara bendera di halaman gedung Setjen MPR/DPR/DPD RI pada 29 Agustus lalu. Ini momentum refleksi perjalanan panjang DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah sekaligus inspektur upacara menyampaikan pentingnya peran pegawai di lingkungan parlemen dalam mendukung tugas-tugas lembaga sekaligus menjaga kedekatan dengan masyarakat. Peringatan HUT DPR ke-80 bukan sekadar seremoni, tetapi juga

penegasan kembali bahwa DPR adalah rumah rakyat yang harus mencerminkan nilai demokrasi, empati, dan kepedulian sosial

"Pegawai DPR/MPR/DPD adalah bagian penting dari wajah lembaga. Karena itu, sikap, disiplin, dan keteladanan mereka di mata masyarakat akan sangat memengaruhi kepercayaan publik terhadap lembaga," ujarnya saat

wawancara langsung dengan Parlementaria usai pelaksanaan upacara.

Ia menyerukan agar seluruh pegawai tidak terprovokasi oleh dinamika sosial yang tengah terjadi dan tetap menjaga sikap tenang. "Jangan sampai kita memicu keributan. Pegawai DPR/MPR/DPD harus bisa menahan diri, menjaga kedamaian, dan tetap menjalankan tugasnya dengan disiplin. Ini penting, agar lembaga bisa stabil dan memberi contoh baik," tambahnya.

Dalam situasi tertentu, lanjut Fauziah, bekerja dari rumah (WFH) bisa menjadi pilihan. Namun, ia menekankan, fleksibilitas tersebut tidak boleh mengurangi produktivitas dan tanggung jawab. "WFH bisa dilakukan bila memang diperlukan,



FOTO: GJ/VEL

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di halaman Setjen MPR/DPR/DPD RI, Jumat (29/8/2025).



Kepala Biro Umum Setjen DPR RI, Rudy Rochmansyah (☑) foto bersama di sela-sela kegiatan donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

tetapi yang utama adalah tugas dan pelayanan DPR/MPR/DPD kepada masyarakat tetap berjalan optimal," katanya.

Lebih jauh, ia menilai usia ke-80 tahun DPR RI harus dimaknai sebagai momentum memperkuat peran sosial lembaga. DPR, menurutnya, bukan hanya wadah legislasi dan pengawasan, tetapi juga simbol kedekatan dengan rakyat. "HUT DPR ini harus menjadi pengingat bahwa DPR hadir bukan hanya sebagai lembaga politik, tapi juga sebagai representasi rakyat yang peduli dengan persoalan sosial," tegas Fauziah.

Dalam konteks ini, pegawai DPR memiliki tanggung jawab besar untuk menunjang peran lembaga. Kedekatan mereka dengan masyarakat sehari-hari harus diimbangi dengan sikap empati dan pelayanan yang tulus. "DPR harus mampu menunjukkan empati dan kedisiplinan, itu sekaligus menjadi wujud nyata DPR sebagai

lembaga yang dekat dengan rakyat," ungkapnya

Donor Darah

Sebelumnya, pada waktu yang berbeda, masih dalam momentum HUT DPR ke-80, Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI). Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudy

Rochmansyah, menjelaskan bahwa kegiatan donor darah bukan sekadar agenda tahunan, melainkan sarana memperkuat kepedulian sosial dan solidaritas di antara sesama.

"Donor darah ini bukan hanya soal memberi, tetapi juga tentang kebersamaan. Setiap kantong darah yang disumbangkan adalah wujud nyata solidaritas kemanusiaan," tegas Rudy. Tahun ini, Setjen DPR RI menyediakan hingga 500 kantong darah, yang terdiri dari 200 kantong dari PMI DKI Jakarta dan 300 kantong dari PMI Tangerang.

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar 300 kantong. Hal ini dilakukan mengingat kebutuhan darah di masyarakat terus meningkat, sementara ketersediaan di PMI terbatas. "Antusias pegawai dan karyawan di Setjen DPR RI untuk menjadi pendonor sangat tinggi. Setetes darah yang kita sumbangkan bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Karena itu, mari kita jadikan donor darah sebagai bagian dari gaya hidup sehat sekaligus wujud kepedulian sosial," ujar Rudy.

Selain memberi manfaat bagi penerima, donor darah juga berdampak positif bagi kesehatan pendonor. Hal ini ditegaskan oleh dr. Elly dari PMI Provinsi DKI Jakarta yang menjelaskan bahwa dengan mendonorkan darah, tubuh akan mengalami regenerasi sel baru

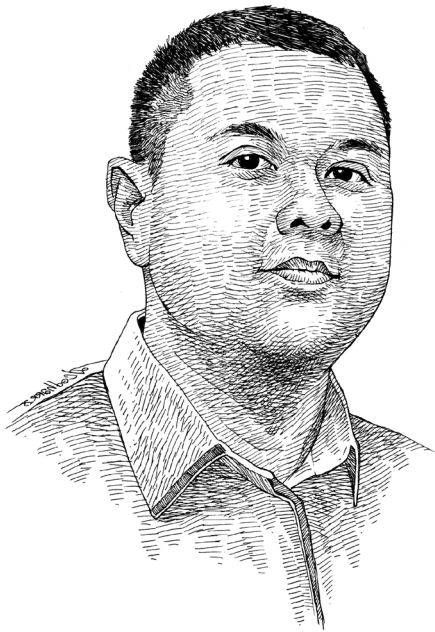


“
Donor darah ini bukan hanya soal memberi, tetapi juga tentang kebersamaan. Setiap kantong darah yang disumbangkan adalah wujud nyata solidaritas kemanusiaan

Rudy Rochmansyah
Kepala Biro Umum Setjen DPR RI

sehingga lebih sehat, sekaligus membantu deteksi dini terhadap penyakit. "Kebutuhan darah di DKI Jakarta mencapai 900-1000 kantong per hari. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat membantu pemenuhan stok darah," jelasnya.

Rudy berharap kegiatan donor darah di lingkungan Setjen DPR RI terus dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai kontribusi nyata lembaga terhadap masyarakat. "Donor darah adalah aksi kemanusiaan sederhana tetapi penuh makna. Inilah cara kami memaknai kemerdekaan, dengan berbagi dan peduli terhadap sesama," pungkasnya. **hal/mh**



Oleh:
M. Yusuf Ramadhan
RS Thalia Irham Gowa

Tennis Elbow: **Cedera Kecil yang Tak Boleh Dianggap Remeh**

Musim bermain *paddle* tengah marak, tapi hati-hati! Di balik euforia olahraga ini, muncul satu cedera yang sering menghantui pemain, yaitu *Tennis Elbow*. Meski namanya mengacu pada olahraga tenis, kondisi ini juga sering terjadi pada pemain *paddle*, *badminton*, hingga pemain tenis meja.

Apa Itu *Tennis Elbow*?

Tennis Elbow atau dalam istilah medis disebut *Lateral Epicondylitis*, adalah peradangan atau kerusakan pada tendon di sisi luar siku yang menghubungkan otot lengan bawah ke tulang lengan atas (humerus). Tendon ini bertugas membantu gerakan pergelangan dan jari, terutama saat melakukan gerakan ekstensi (meluruskan).

Penyebab utama kondisi ini adalah *overuse*, penggunaan berulang otot-otot lengan bawah, terutama saat menggenggam atau mengayunkan raket. Hal ini menyebabkan robekan mikro (*microtears*) yang bila dibiarkan bisa menyebabkan peradangan kronis.

Gejala yang Perlu Diwaspadai

Gejala *tennis elbow* biasanya berkembang secara bertahap. Beberapa tanda khasnya meliputi:



Nyeri dan rasa terbakar di sisi luar siku, terutama setelah aktivitas menggenggam atau mengayun.

Kelemahan cengkeraman tangan, misalnya saat menggenggam raket, membuka botol, atau berjabat tangan.

Rasa tidak nyaman saat mengangkat benda, bahkan yang ringan seperti secangkir kopi.

Gejala ini bisa memburuk jika terus digunakan tanpa istirahat atau perawatan.

Bagaimana Penanganannya?

Sebagian besar kasus *tennis elbow* tidak memerlukan pembedahan. Penanganan konservatif adalah yang utama, dengan pendekatan sebagai berikut:

1. R-I-C-E: Pertolongan Awal Saat Nyeri Muncul

Metode R-I-C-E (Rest, Ice, Compression, Elevation) adalah langkah awal yang efektif saat nyeri atau peradangan mulai terasa:

Rest (Istirahat): Hindari aktivitas yang memperparah nyeri, seperti bermain *paddle* atau mengangkat benda berat. Memberi waktu istirahat adalah kunci pemulihan.

Ice (kompres dingin): Tempelkan es yang dibungkus kain ke area nyeri selama 15–20 menit, 3–4 kali sehari, terutama pada 48–72 jam pertama untuk mengurangi peradangan.

Compression (tekanan): Gunakan *brace* atau *elbow strap* untuk memberikan tekanan ringan yang membantu mengurangi pembengkakan dan menopang otot.

Elevation (elevasi): Jaga posisi lengan lebih tinggi dari jantung bila memungkinkan, untuk mengurangi aliran darah berlebih yang dapat memperparah pembengkakan.

2. Terapi Fisik

Fisioterapi tetap menjadi pendekatan utama untuk pemulihan jangka panjang. Fokusnya meliputi: Latihan penguatan eksentrik (gerakan melawan beban saat otot memanjang), peregangan otot lengan bawah, dan terapi tambahan seperti *ultrasound*, *elektroterapi*, atau *dry needling* jika dibutuhkan.

3. Obat Anti-inflamasi (NSAID)

Obat seperti *ibuprofen* atau *naproxen* digunakan dalam fase akut untuk meredakan nyeri dan peradangan.



Penyebab utama kondisi ini adalah *overuse*, penggunaan berulang otot-otot lengan bawah, terutama saat menggenggam atau mengayunkan raket. Hal ini menyebabkan robekan mikro (*microtears*) yang bila dibiarkan bisa menyebabkan peradangan kronis.

4. Alat Bantu

Brace/penyangga khusus untuk *tennis elbow* membantu mengurangi tekanan pada tendon saat beraktivitas.

5. Injeksi (Opsional)

Pada kasus yang tak membaik, injeksi antiradang atau *platelet-rich plasma* (PRP) bisa

dipertimbangkan, yang tentunya sesuai dengan indikasi oleh dokter.

6. Pembedahan

Langkah terakhir bila terapi konservatif gagal dalam 6–12 bulan, biasanya dilakukan untuk mengangkat jaringan tendon yang rusak.

Pencegahan Tennis Elbow Saat Berolahraga

Agar tetap aktif bermain tanpa risiko cedera, berikut beberapa tips pencegahan yang direkomendasikan:

1. Pemanasan dan Pendinginan

Selalu lakukan pemanasan dinamis sebelum bermain dan pendinginan setelahnya, termasuk peregangan otot lengan bawah.

2. Perkuat Otot-otot Lengan

Latihan penguatan otot-otot lengan bawah seperti *wrist curls*, *reverse curls*, dan *squeezing ball*.

3. Gunakan Teknik dan Peralatan yang Tepat

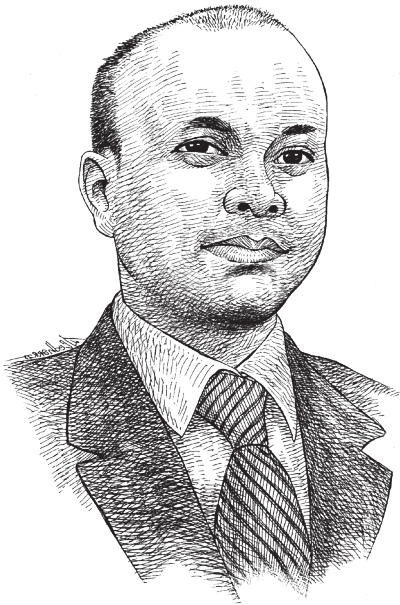
Kesalahan teknik ayunan atau penggunaan *paddle* yang terlalu berat bisa meningkatkan risiko cedera. Konsultasikan dengan pelatih untuk memperbaiki teknik.

4. Jangan Abaikan Rasa Nyeri

Rasa sakit adalah sinyal dari tubuh. Jangan paksaan bermain jika sudah terasa nyeri di siku.

Tennis elbow bukan hanya milik atlet tenis, tetapi juga ancaman nyata bagi pemain *paddle* yang kini sedang digemari. Meski sering dianggap sepele, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas sehari-hari jika tidak ditangani dengan baik dan bisa berdampak pada produktivitas pekerjaan khususnya pekerjaan yang menggunakan tangan.

Dengan mengenali gejalanya sejak dini, melakukan pencegahan, dan menjalani penanganan yang tepat, kita bisa tetap menikmati olahraga favorit tanpa khawatir cedera.



Oleh:

Azriansyah

Peneliti Populi Center, Jakarta.
Research Fellow, Indonesian
Institute for Foreign Affairs
(IIFA), Universitas Islam
Internasional Indonesia (UIII)

Ketidakpekaan ini termanifestasi dalam disetujuinya kenaikan tunjangan bagi para anggota DPR serta perilaku sebagian legislator yang berjoget di sela sidang tahunan MPR pada 16 Agustus lalu. Alih-alih meredam kritik publik secara elegan, beberapa legislator justru membalasnya dengan ucapan dan tindakan yang tidak simpatik sehingga memantik aksi massa yang memakan korban jiwa. Tak dapat dipungkiri, "Demonstrasi Agustus" tersebut adalah mekanisme korektif warga terhadap wakil-wakilnya di lembaga legislatif. Dengan demikian, koreksi seperti apa yang perlu dipertimbangkan untuk memulihkan dislokasi elektoral tersebut?

Perspektif klasik dalam ilmu politik menempatkan lembaga

legislatif di tempat yang terhormat. Montesquieu menggagas lembaga legislatif sebagai inisiator kebijakan publik yang merefleksikan kepentingan rakyat demi kebaikan bersama. Meskipun dalam perkembangan zaman kebijakan publik secara perlahan didominasi oleh lembaga eksekutif, bahkan presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu, tetapi otoritas sebagai lembaga yang menjadi representasi rakyat tetaplah menjadi domain dari



Kritik tajam dari publik kepada DPR janganlah ditafsirkan sebagai irrelevansi dari DPR yang berujung pada argumen bahwa lembaga legislatif ini tidak diperlukan bahkan sebaiknya dibubarkan

Dislokasi Elektoral

Dislokasi elektoral, bukan sekadar masalah moral atau etika dari para legislator. Ini adalah akar persoalan yang memicu tumpahnya amarah publik dalam wujud demonstrasi pada akhir Agustus silam. DPR dinilai tidak peka terhadap kesulitan yang dihadapi rakyat dan mendapat porsi kritik paling besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

lembaga legislatif. Koneksi elektoral, meminjam konsep dari David Mayhew (1974), yang menghubungkan rakyat dengan elit negara inilah yang menjadi sumber legitimasi utama dari keharusan lembaga legislatif untuk tetap eksis baik dalam sistem demokratis maupun otoriter sekalipun (Gandhi 2008). Manakala koneksi elektoral tersumbat maka kemurkaan publik tidak lagi dapat disalurkan melalui mekanisme politik resmi di parlemen. Akibatnya adalah katastrofi politik, bisul sosial pecah dan tumpah ruah di jalanan yang berujung pada kerusuhan dan penjarahan.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka kritik tajam dari publik kepada DPR janganlah ditafsirkan sebagai irrelevansi dari DPR yang berujung pada argumen bahwa lembaga legislatif ini tidak diperlukan bahkan sebaiknya dibubarkan. Sebaliknya, kritik tersebut menunjukkan tingginya ekspektasi publik yang belum dapat dipenuhi oleh para wakilnya. Kritik kepada DPR adalah fungsi dari apa yang penulis definisikan sebagai "dislokasi elektoral". Sama halnya seperti di dunia medis yang mengartikan dislokasi sebagai pergeseran tulang atau sendi karena adanya tekanan yang besar, maka dislokasi elektoral

adalah bergesernya akuntabilitas dan kepekaan dari para legislator dari konstituen kepada partai politik akibat dari dominasi elite partai. Jika di masa kampanye para caleg begitu peka dan akuntabel dalam menanggapi kebutuhan konstituennya bahkan mereka tak segan untuk melakukan politik uang, maka ketika mereka sudah terpilih akuntabilitas dan responsivitas tersebut bergeser dari konstituen kepada elite partai politik. Begitu mereka dilantik sebagai anggota dewan, laku politik para legislator bergeser menjadi petugas partai: lebih peka dan bertanggungjawab kepada kepentingan elite partai ketimbang konstituennya di daerah pemilihan. Akibatnya, legislasi yang dihasilkan tidak partisipatif dan mengakomodasi kepentingan elite nasional ketimbang kepentingan rakyat. Dislokasi elektoral membuat lembaga legislatif mengalami diskoneksi dari realitas kehidupan rakyat sehingga lembaga tersebut tidak bisa menjalankan fungsi asasinya: menghimpun dan menyuarakan aspirasi rakyat.

Berdasarkan anatomi persoalan di atas, maka agenda DPR ke depan adalah memulihkan dislokasi elektoral ini melalui dua opsi yang dapat ditempuh. Opsi pertama adalah penguatan otonomi dari para legislator untuk memainkan agensinya sebagai wakil yang menyuarakan aspirasi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing. Sistem pemilu proporsional terbuka telah membuka akses bagi pemilih untuk menentukan individu yang mereka kehendaki sebagai wakil mereka di legislatif dengan mediasi partai yang minimal. Dengan demikian, maka elite partai harus menempatkan para legislator sebagai aktor otonom sehingga lebih leluasa dalam menyalurkan aspirasi konstituennya dalam produk legislasi, bukan sebagai petugas partai yang segala laku politiknya berada dibawah komando elite partai. Jika

opsi pertama tidak dikehendaki, maka dalam opsi kedua elite partai harus segera membenahi kelembagaan partai. Penguatan kelembagaan partai memiliki ruang lingkup yang luas, tetapi dalam perspektif penulis setidaknya ada tiga aspek yang seharusnya menjadi prioritas yaitu penajaman visi partai, peningkatan kapasitas kader, dan penguatan kapasitas finansial partai. Penguatan tiga aspek kelembagaan tersebut bermuara pada partai politik yang terlembaga, visioner, dan mandiri, sehingga tidak lagi bergantung pada para pemengaruh atau kalangan yang membeli suara dengan uang dan mampu menempatkan legislator yang cakap dan tanggap dalam mengartikulasikan aspirasi rakyat. Demonstrasi Agustus lalu sudah sepatutnya menjadi momentum untuk memulihkan dislokasi electoral ini sehingga DPR dapat kembali ke posisinya di era pra-dislokasi: lembaga politik yang mewakili dan mengartikulasikan kepentingan rakyat. 🇮🇩

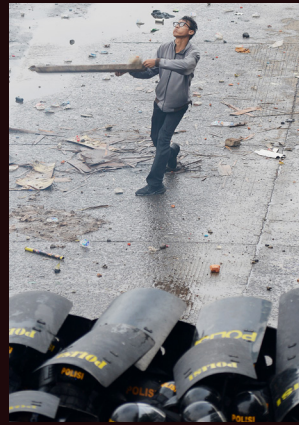


MENERIMA ASPIRASI

**Untuk Perubahan
yang Lebih Baik**

Narasi: Naefuroji • Foto: Andri, Jaka, Farhan, Dep, Runi, Mario





Setelah gelombang demonstrasi yang melanda berbagai daerah pada Agustus 2025, pimpinan DPR RI secara resmi menyatakan telah menerima dan mencermati aspirasi masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan isu tunjangan rumah jabatan serta tuntutan yang dikenal sebagai “17 + 8”.

Aspirasi ini disampaikan dalam berbagai bentuk, baik melalui aksi massa, pernyataan terbuka dari organisasi masyarakat sipil, hingga surat resmi yang dikirim ke lembaga legislatif.

Pimpinan DPR menegaskan bahwa suara rakyat merupakan landasan utama dalam pengambilan kebijakan publik. Oleh karena itu, setiap tuntutan dan kritik yang disampaikan akan menjadi perhatian serius lembaga legislatif. Isu tunjangan rumah pejabat, yang menjadi salah satu sorotan utama demonstrasi, akan dikaji kembali dengan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, transparansi anggaran, serta kondisi ekonomi nasional yang saat ini masih dalam tahap pemulihan pasca-pandemi dan ketidakstabilan global.

Terkait tuntutan “17 + 8”, yang berisi 17 poin tuntutan utama serta 8 tambahan rekomendasi kebijakan, DPR menyatakan terbuka untuk melakukan dialog konstruktif dengan perwakilan masyarakat, serikat pekerja,

akademisi, dan elemen sipil lainnya. Proses ini akan dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan melalui forum-forum resmi, termasuk rapat dengar pendapat umum dan konsultasi publik. DPR juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dan pengawasan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat.

Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPR berkomitmen menjaga kepercayaan publik melalui transparansi dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas. Pimpinan DPR mengajak seluruh elemen bangsa terus mengawal proses ini secara damai dan demokratis, serta bersama-sama membangun sistem pemerintahan yang lebih adil, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Aspirasi masyarakat adalah cermin dari demokrasi yang hidup. DPR akan terus memastikan bahwa suara tersebut mendapat tempat yang layak dalam proses pengambilan keputusan negara.





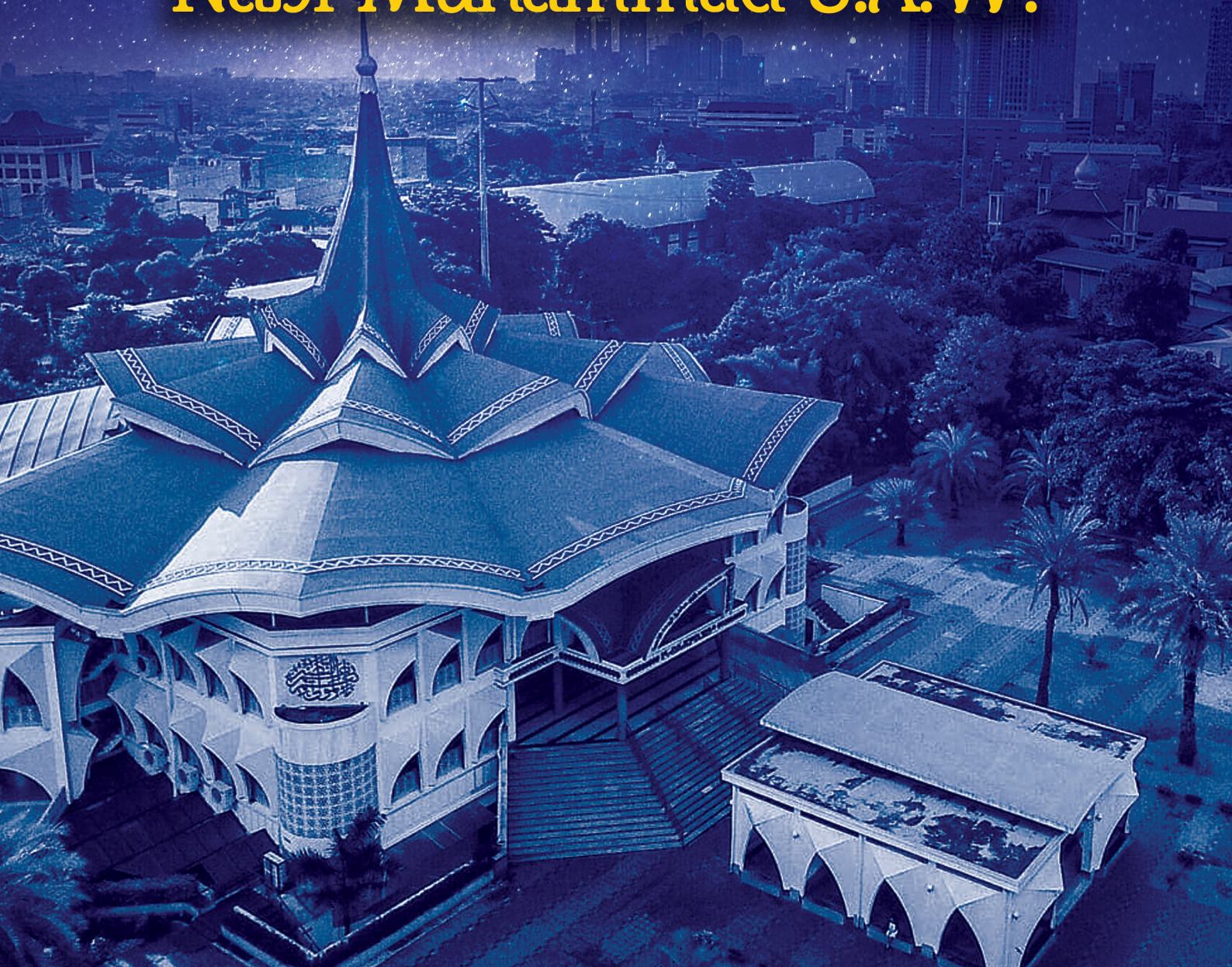




SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

MENGUCAPKAN :

Maulid Nabi Muhammad S.A.W.



DPR RI



DPR RI



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri



@dpr_ri